



Kajian
**PENATAAN WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. Letjen. S. Parman No. 15 Telp. (0234) 271722, 272798 Fax. 271711 – Indramayu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Evaluasi Inovasi Kabupaten Indramayu dapat diselesaikan dengan baik.

Tingginya dinamika kehidupan sosial melahirkan harapan warga yang semakin meningkat sementara di sisi lain pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan sarana. Saat dihadapkan pada realita tersebut, kami yakin bahwa Penataan Wilayah adalah jawabannya.

Penataan Wilayah merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Evaluasi Penataan Wilayah Kabupaten Indramayu disusun sebagai *feed back* (masukan) pelaksanaan Penataan Wilayah di Kabupaten Indramayu yang memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam rangka penetapan Penataan Wilayah yang dilegitimasi melalui Keputusan Kepala Daerah.

Bersama ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan evaluasi ini. Semoga evaluasi ini dapat bermanfaat dalam rangka mendukung tercapainya visi Kabupaten Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera serta terciptanya keunggulan daerah melalui berbagai kegiatan inovasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

WAWANG IRAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19601222 198003 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	4
1.3. RUANG LINGKUP KAJIAN.....	4
1.4. KERANGKA LAPORAN HASIL KAJIAN	5
BAB II. KERANGKA TEORI	6
2.1. KONSEP DAN DEFINISI	6
2.2. KLASIFIKASI WILAYAH.....	9
2.3. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN.....	13
BAB III. METODOLOGI.....	14
3.1. DESKRIPSI <i>LOCUS</i> KAJIAN.....	14
3.2. UNIT ANALISIS.....	15
3.3. JENIS KAJIAN DAN STRATEGI.....	16
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	17
3.5. TEKNIK ANALISA DATA.....	33
3.6. DESAIN KAJIAN.....	34
BAB IV. ANALISA KAJIAN.....	36
4.1 Deskripsi Data bidang Pemerintahan	36
4.1.1 Pemerintahan Desa	36
4.1.2 Kinerja	37
4.1.3 Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	39
4.1.4 Desa Berbasis Teknologi Informasi / e-Government.....	41
4.1.5 Pelestarian Adat dan Budaya.....	43
4.2 Deskripsi Data Bidang Kewilayahan.....	47
4.2.1 Inovasi.....	47
4.2.2 Tanggap dan Siaga Bencana.....	49

4.2.3	Pengaturan Investasi	51
4.3	Deskripsi Data Bidang Kemsyarakatan	55
4.3.1	Partisipasi Masyarakat	55
4.3.2	Lembaga Kemasyarakatan.....	56
4.3.3	Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	58
4.3.4	Keamanan dan Ketertiban.....	60
4.3.5	Pendidikan	62
4.3.6	Kesehatan.....	64
4.3.7	Ekonomi	65
4.3.8	Penanggulangan Kemiskinan.....	67
4.3.9	Peningkatan Kapasitas Masyarakat.....	69
4.4	Analisis Data Kajian.....	73
4.5	Lembaga Kemasyarakatan.....	74
4.5	Analisis Klaster	75
4.5.1	Analisis klaster Bidang Pemerintahan	75
4.5.2	Analisis klaster Bidang Kewilayahan	77
4.5.3	Analisis klaster Bidang Kemasyarakatan.....	79
BAB V. SARAN DAN KESIMPULAN.....		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Rekomendasi.....	84
5.2.1	Bidang Pemerintahan	84
5.2.2	Bidang Kewilayahan	85
5.2.3	Bidang Kemasyarakatan.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Pemerintahan	18
Tabel 2: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Kewilayahan	24
Tabel 3: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Kemasyarakatan.....	28
Tabel 4: Capaian Pemerintah Desa	36
Tabel 5: Kinerja Pemerintahan Desa.....	38
Tabel 6: Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	40
Tabel 7: Desa Berbasis Teknologi Informasi / e-Government	41
Tabel 8: Pelestarian Adat dan Budaya	43
Tabel 9: Bidang Pemerintahan	45
Tabel 10: Indikator Aspek Bidang Pemerintahan.....	46
Tabel 11: Inovasi.....	47
Tabel 12: Tanggap dan Siaga Bencana	49
Tabel 13: Pengaturan Investasi	51
Tabel 14: Bidang Kewilayahan	53
Tabel 15: Indikator Aspek Bidang Kewilayahan.....	54
Tabel 16: Partisipasi Masyarakat	55
Tabel 17: Lembaga Kemasyarakatan	57
Tabel 18: Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.....	59
Tabel 19: Keamanan dan Ketertiban.....	60
Tabel 20: Pendidikan.....	62
Tabel 21: Kesehatan.....	64
Tabel 22: Ekonomi	66
Tabel 23: Penanggulangan Kemiskinan	67
Tabel 24: Peningkatan Kapasitas Masyarakat	69
Tabel 25: Bidang Kemasyarakatan	71
Tabel 26: Indikator Bidang Kemasyarakatan.....	72
Tabel 27: Rekapitulasi semua Bidang	73
Tabel 28: Klaster Bidang Pemerintahan.....	75
Tabel 29: Klaster Bidang Kewilayahan.....	77
Tabel 30: Klaster Bidang Kemasyarakatan	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Para ahli bersepakat bahwa unsur-unsur suatu negara terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu adanya penduduk/rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan, dan adanya kedaulatan. Dari 4 unsur tersebut, 3 merupakan unsur mutlak, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan. Indonesia sebagai negara besar dengan kompleksitas yang dimiliki membutuhkan adanya suatu perencanaan penataan wilayah yang matang dan terkoordinasi dengan baik. Konsep penataan wilayah perlu dikembangkan mengingat keragaman potensi fisik-sosial-ekonomi-dan budaya, yang pada gilirannya akan membawa berbagai masalah.

Perkembangan daerah-daerah di Indonesia dewasa ini dicirikan oleh terbatasnya ketersediaan dan daya tampung lahan untuk pembangunan yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan distribusi penduduk. Disamping semakin meningkatnya kegiatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin dalam bentuk perluasan ruang yang meningkat pula. Untuk itu, ketersediaan dan daya tampung wilayah serta jumlah dan distribusi penduduk kota menjadi aspek-aspek yang sangat penting dan mutlak untuk diperhatikan dalam penataan wilayah.

Wilayah memiliki fungsi yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya wilayah karena merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk serta berbagai aktifitas ekonomi dan sosial karena wilayah merupakan pintu gerbang masuknya segala pengaruh dan kemajuan yang berasal dari luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya.

Perkembangan penduduk yang cukup pesat diikuti oleh perkembangan jenis dan intensitas kegiatan dengan segala fasilitasnya juga berpengaruh dalam merubah wujud fisik wilayah. Demikian pula dengan tuntutan kegiatan dan pengadaan prasarana dan fasilitas wilayah yang melampaui daya dukung lahan serta tidak menghiraukan kesesuaian lahannya, maka timbul masalah lingkungan. Permasalahan seperti ini akan terus berlangsung sedikit

demis sedikit dan suatu saat akan sulit atau mahal untuk diselesaikan akibat keterlambatan dalam pengendaliannya.

Permasalahan lain adalah sering terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali dengan peruntukan fasilitas seperti permukiman, perkantoran, dan lain-lainnya. Permasalahan alih fungsi yang tidak terkendali ini akan menimbulkan berbagai ragam persoalan seperti, tidak jelasnya struktur dan pola. Permasalahan lainnya dari wilayah adalah perselisihan batas-batas wilayah administrasi. Dalam skala global, perselisihan batas-batas wilayah antar negara, dan dalam lingkup yang lebih kecil perselisihan batas-batas wilayah antar desa.

Untuk mengatasi berbagai masalah-masalah tersebut maka diperlukan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum dalam penataan wilayah. Terbitnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi legitimasi atas pengaturan wilayah secara spasial. Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dapat menjadi landasan hukum dalam rangka penataan wilayah administrasi pemerintahan. Lebih lanjut, Undang-undang 23/2014 memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau secara singkat disebut otonomi daerah. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-undang tersebut adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan potensi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu adanya evaluasi untuk melihat keefektifan sasaran tercapainya peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan potensi daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang bersifat kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan evaluasi terhadap penataan wilayah sebagai proses pengambilan kebijakan dalam menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Indramayu. Terkait dengan hal tersebut, Bappeda

Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan **Kajian Penataan Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.**

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Maksud

Penyusunan kajian penataan wilayah Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penataan wilayah di Kabupaten Indramayu.

1.2.2. Tujuan

Secara khusus, penyusunan kajian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi perkembangan permasalahan daerah dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang.
- 2) Menyediakan bahan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
- 3) Menyediakan bahan upaya keselarasan aspirasi pembangunan daerah
- 4) Menyediakan bahan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

1.2.3. Sasaran

Sasaran kajian ini adalah tersusunnya hasil-hasil rekomendasi penataan wilayah di Kabupaten Indramayu dalam 1 dokumen kajian.

1.3. RUANG LINGKUP KAJIAN

1.3.1. Ruang Lingkup Substansi

Materi pada kajian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Penataan wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Indramayu mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Penataan wilayah pembangunan di Kabupaten Indramayu mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Dalam lingkup kewilayahan, kajian ini dibatasi pada ruang lingkup di wilayah administrasi Kabupaten Indramayu

1.4. KERANGKA LAPORAN HASIL KAJIAN

Penulisan hasil kajian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan kajian.

Bab II Kerangka Teori, menguraikan tentang berbagai definisi dan konsep kajian, penataan, wilayah, dan definisi lain yang dianggap berkaitan.

Bab III Metodologi, menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penyusunan kajian ini.

Bab IV Analisa, menggambarkan tentang hasil kajian yang dianalisa sesuai dengan kerangka teori yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari uraian kajian dan saran rencana tindak lanjut atas hasil kajian.

BAB II. KERANGKA TEORI

2.1. KONSEP DAN DEFINISI

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Aspek administratif menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah, misalnya wilayah negara, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten. Sedangkan aspek fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya wilayah perkotaan dan perdesaan.

Penataan wilayah pada hakekatnya adalah penataan ruang jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

A. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas secara berhierarki terdiri dari:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
- Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

B. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya tersebut termasuk jабaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud di atas disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:

- perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan

- pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis tersebut ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan:

- standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- standar kualitas lingkungan; dan
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :

- Penetapan peraturanzonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
- Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi ditetapkan dengan:

- peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
- peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
- peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

D. Penataan Ruang Perkotaan

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

- Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau

- Kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Kawasan perkotaan tersebut menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.

E. Penataan Ruang Perdesaan

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- konservasi sumber daya alam;
- pelestarian warisan budaya lokal;
- pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud di atas dapat berbentuk kawasan agropolitan.

2.2. KLASIFIKASI WILAYAH

Konsep yang memandang wilayah sebagai cara untuk mengklasifikasi berkembang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Dulu ketika ekonomi masih berupa sistem pertanian yang sederhana, wilayah dipandang sebagai “wilayah formal” yang didefinisikan berdasarkan homogenitas. Fase selanjutnya melihat wilayah sebagai “wilayah fungsional” dengan perhatian pada independensi. Interaksi antar bagian-bagian wilayah didefinisikan berdasarkan hubungan fungsional (Glasson, 1978: 37 dalam Nurzaman, 2012).

Menurut Rustiadi (2009) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis.

Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, dkk, 1977 dalam Rustiadi, 2009) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan *region/wilayah* menjadi :

1. Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/*homogenitas*. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik.
2. Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.
3. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Suatu wilayah formal adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan kriteria homogenitas. Pada awalnya homogenitas ini berdasarkan kriteria fisik dan berkaitan dengan konsep geografi, misalnya topografi, iklim dan vegetasi. Menentukan batas (deliniasi wilayah) kawasan ini dapat dilakukan misalnya dengan melihat kesamaan dalam karakteristik ekonomi, seperti persentase penduduk petani terhadap seluruh penduduk, kesamaan tingkat penghasilan penduduk, penggunaan tanah yang dominan, dan sebagainya (Nurzaman, 2012).

Dalam pengertian wilayah fungsional wilayah ini, juga digunakan untuk membedakan wilayah berdasarkan pergerakan

penduduknya dalam kegiatan sehari-hari. Dikenal ada wilayah sebagai penyerap (*demand*) dan ada yang berperan sebagai penyedia (*supply*) manusia (Sadyohutomo, 2009).

Suatu “wilayah fungsional” adalah suatu wilayah yang didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu serta memperlihatkan suatu hubungan fungsional atau interdependensi antara bagian-bagiannya. Karena interdependensi ini bisanya terikat oleh suatu *node* (pusat), seringkali wilayah ini disebut sebagai wilayah nodal atau wilayah terpolarisasi yang terdiri atas unit-unit yang heterogen, seperti kota besar, kota kecil, dan permukiman. Semua unit ini terikat oleh suatu *node*. Ikatan ini dapat tergambarkan dalam aliran berdasarkan kriteria sosio-ekonomi. Misalnya saja aliran barang antara *node* dengan kota-kota sekitarnya akan penglaju (*commuters*) dan sebagainya (Glasson, 1987: 38). Contoh wilayah nodal di Indonesia yang sangat jelas adalah Jabodetabek, dengan Jakarta sebagai *node*-nya mempunyai ikatan yang erat dengan Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor dan mungkin sekarang sudah melebar ke sebagian Karawan dan Serang. Banyak penduduk Bekasi, Tangerang, Bogor yang bekerja di Jakarta atau sebaliknya. Pabrik-pabrik di Bekasi, Tangerang, dan Bogor, kantor pusatnya berada di Jakarta (Nurzaman, 2012).

Menentukan batas wilayah (deliniasi wilayah) fungsional atau wilayah nodal ini dapat dilakukan, misalnya dengan melihat besarnya volume lalu lintas. Apabila volume lalu lintas masi besar berarti wilayah tersebut masih terikat dengan *node*-nya.

Analisis mengenai wilayah formal dan fungsional di atas menunjukkan bahwa penentuan wilayah secara subjektif bukanlah tujuan akhir. Penentuan wilayah hanya alat untuk mencapai tujuan. Seperti penentuan wilayah pesawahan di daerah Pantura, pada waktu menentukan deliniasi wilayah, pasti telah ditentukan tujuan dibentuknya wilayah tersebut. Apakah untuk peningkatan produktivitas sawah atau perkantoran, atau tujuan lainnya. Tiap tujuan tersebut akan memberikan deliniasi wilayah yang berbeda. Demikian juga pada saat menentukan wilayah fungsional (Nurzaman, 2012).

Dengan demikian, wilayah formal dan wilayah fungsional dapat menjadi kerangka penentuan klasifikasi ketiga dari wilayah subjektif, yaitu wilayah perencanaan (*planning region*). Boudeville mendefinisikan wilayah perencanaan atau disebut juga sebagai wilayah pemrograman (*programming region*) sebagai suatu wilayah yang memperlihatkan keterkaitan atau kesatuan atas keputusan-keputusan ekonomi. Keeble memberi batas dari wilayah perencanaan ini: wilayah perencanaan harus cukup luas sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam distribusi penduduk dan lapangan kerja, tetapi cukup kecil sehingga persoalan perencanaan dapat dilihat sebagai satu kesatuan (Glasson, 1978: 39 dalam Nurzaman, 2012).

Jadi, sebagai kesimpulan, menurut pandangan subjektif dikenal tiga klasifikasi wilayah, yaitu wilayah formal atau disebut juga sebagai wilayah homogen, wilayah fungsional atau disebut juga sebagai wilayah nodal atau wilayah interpendensi, serta wilayah perencanaan atau wilayah pemrograman. Konsep klasifikasi wilayah seperti ini merupakan konsep yang sudah lama. Walaupun konsep ini lama, tetapi konsep ini sangat populer dan banyak sekali dibahas. Richardson, misalnya, membahas mengenai ketiga klasifikasi wilayah ini pada tahun 1978 (Nurzaman, 2012).

Menurut Richardson, wilayah homogen adalah wilayah yang mempunyai karakteristik yang seragam, di mana perbedaan-perbedaan internal dan interaksi intraregional dianggap tidak penting. Wilayah nodal, atau disebut juga oleh Richardson sebagai wilayah terpolarisasi, adalah wilayah dimana keseragaman dianggap tidak penting. Kesatuan wilayah didapat dari aliran internal, kontak, serta interpendensi yang biasanya terpolarisasi ke *node* atau pusat yang dominan. Wilayah perencanaan atau wilayah pemrograman adalah wilayah yang terbentuk oleh batas administrasi (Richardson, 1978: 19-22). Friedman, pada tahun 1966 baru membahas dua kelas wilayah, yaitu wilayah homogen dan wilayah interpendensi, istilah yang diberikan untuk wilayah nodal (Friedman, 1966: 41). Hoover membahas mengenai ketiga wilayah ini pada tahun 1975 (Hoover, 1975: 151-153). Pada tahun 1995, Stilwell masi membagi wilayah ke dalam ketiga kelas wilayah ini (Stilwell,

1995: 45-46). Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa pandangan subjektif atas wilayah populer sekali, bahkan penulis Indonesia pun seperti Sadono, Tjokroamidjojo, Hadjisaroso, Esnava, dan Budiharsono pada tahun 1976, 1979, 1980, 1985, dan 2001 membahas ulang mengenai ketiga klasifikasi wilayah seperti ini. (Nurzaman, 2012).

2.3. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Kerangka konseptual penyusunan kajian penataan wilayah kabupaten Indramayu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Unit analisis pada kajian ini adalah unit terkecil dari wilayah administrasi pemerintahan yaitu desa.
- (2) Desa diidentifikasi permasalahannya berdasarkan perencanaan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, inovasi desa, tanggap bencana, pendidikan, kesehatan dan perekonomian perencanaan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, inovasi desa, tanggap bencana, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- (3) Permasalahan yang dapat diidentifikasi merupakan gambaran kondisi saat ini yang dapat dijadikan *baseline* dalam rangka pentaan wilayah.
- (4) Sebagaimana diuraikan pada latarbelakang bahwa tujuan penataan wilayah adalah penyelarasan dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan potensi daerah.
- (5) Hasil dari kajian penataan wilayah adalah memberikan rekomendasi terhadap tujuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan potensi daerah.

BAB III. METODHOLOGI

3.1. DESKRIPSI *LOCUS* KAJIAN

Penentuan lokasi kajian dilakukan secara *purposive* yaitu Kabupaten Indramayu. Terdapat beberapa karakteristik yang menonjol di Kabupaten Indramayu sebagai lokasi kajian di antaranya yaitu:

1. Kabupaten Indramayu terletak pada jarak 207 Km ke arah Timur dari **Jakarta** sebagai Ibu Kota Negara dengan waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan transportasi roda empat atau 3 jam menggunakan Kereta Api, dan 180 Km ke arah Timur Laut dari **Bandung** sebagai Ibu Kota Provinsi dengan waktu tempuh sekitar 3 jam menggunakan kendaraan roda empat. Jarak yang cukup dekat dengan waktu tempuh yang relatif sebentar menuju ibu kota nasional dan provinsi menjadi magnet generasi muda untuk bermigrasi untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih maju.
2. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), secara geoekonomi Kabupaten Indramayu ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang mengemban fungsi sebagai **lambung pangan nasional** dan pusat pengolahan migas strategis.
3. Kabupaten Indramayu secara geostrategis terletak di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai simpul strategis transportasi yang berperan sangat dinamis di Pulau Jawa dan Nasional dalam aktifitas lintas provinsi.
4. Wilayah Kabupaten Indramayu seluas **209.942 Ha**, dengan panjang garis pantai **147 Km** membentang sepanjang pantai utara melewati 11 (sebelas) kecamatan. Oleh karena itu, sektor perikanan dan kelautan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu dan menyumbang 61,61% distribusi perikanan kepada provinsi Jawa Barat. Pengolahan lahan berupa tambak seluas 12,86% menjadi mata pencaharian pokok di beberapa wilayah

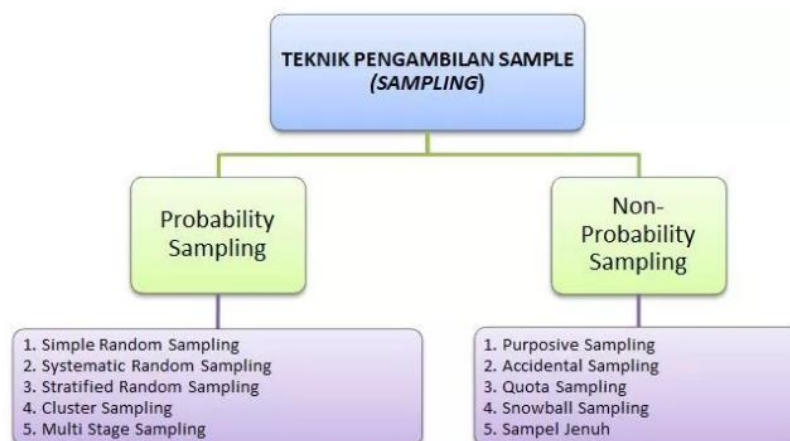
pantai. Wilayah Kabupaten Indramayu mencakup juga beberapa pulau kecil dan wilayah perairan laut.

5. Selain sektor kelautan, wilayah daratan didominasi oleh lahan sawah sebesar 55,92% dari total luas lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan daerah pertanian (agraris). Luas permukiman hanya sebesar 10,03% dari total luas wilayah, sementara luas hutan sebesar 14,70%, perkebunan sebesar 4,26%, industri sebesar 0,48%, kolam sebesar 0,18%, tanah kosong sebesar 0,10%, tambang sebesar 0,002% dan lain-lain sebesar 1,47%.
6. Secara wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Indramayu terbagi kedalam 31 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202 Rukun Tetangga.
7. Pengamatan sementara menunjukkan adanya indikasi bahwa wilayah administrasi pemerintahan belum memiliki *prototype* yang menjadi acuan pengembangan.
8. Adanya Desa Terbaik Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 di Kabupaten Indramayu yaitu Desa Majasari Kecamatan Sliyeg dapat menjadi rujukan *protitype* penataan wilayah di Kabupaten Indramayu. Untuk itu, maka indikator-indikator sebagai desa terbaik dapat dikembangkan menjadi parameter dalam menentukan penataan wilayah.

3.2. UNIT ANALISIS

Unit analisis pada kajian ini adalah desa di Kabupaten Indramayu dengan jumlah sampel sebanyak 93 desa. Tekni pengambilan sampel kajian ini menggunakan *Non Probability Sampling* dengan metode *Purposive sampling*.

Gambar 1: Teknik Pengambilan Sampel



Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari 2 kelas besar yaitu Probability Sampling (Random Sample) Non-Probability Sampling (Non-Random Sample). Kedua jenis tersebut terdiri dari pengambilan secara acak dan pengambilan sampel tidak acak. Kedua jenis ini juga memiliki sub - sub lain yang diantaranya adalah *purposive sampling*, *snowball sampling*, *cluster sampling* dan lain-lain. *Purposive Sampling* adalah teknik sampling yang sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih dalam memilih sampel dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusif. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan berdasarkan tujuan kajian. Sedangkan kriteria eksklusif merupakan kriteria khusus yang menyebabkan unit analisis yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok kajian karena dapat memengaruhi hasil penelitian.

3.3. JENIS KAJIAN DAN STRATEGI

Kajian ini didesain menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang dirancang dalam kerangka pendekatan fenomenologi untuk mengungkap realitas permasalahan kewilayahan sampai tingkat desa. Kajian kualitatif deskriptif dilakukan dengan mengembangkan konsep serta menghimpun data, tetapi tidak memperlakukan pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995).

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

- ***Wawancara mendalam***

Wawancara dilakukan terhadap pejabat Kecamatan yang menjadi informan yang sengaja dipilih dengan memperhatikan kriteria tertentu. Dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi wawancara yang ditetapkan berdasarkan topik utama kajian.

- ***Observasi***

Observasi dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman peneliti terkait konteks penelitian yang dihasilkan ketika proses wawancara. Pada konteks ini, yang akan dilakukan adalah mengobservasi karakteristik wilayah, perencanaan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, inovasi desa, tanggap bencana, pendidikan, kesehatan dan perekonomian perencanaan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, inovasi desa, tanggap bencana, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

- ***Studi dokumen***

Dokumen-dokumen yang ditengarai memiliki relevansi dengan konteks kajian akan sangat menunjang dalam memperdalam pemahaman peneliti secara komprehensif. Oleh karena itu, studi dokumen juga memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas penelitian fenomenologi.

- ***Kuesioner***

Pengumpulan data melalui kuesioner juga dilakukan kepada narasumber pejabat pemerintahan desa yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih banyak daripada yang lain. Dalam melakukan kuesioner, peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang ditetapkan berdasarkan topik utama penelitian ini dengan mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan

Tabel 1: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
I. PEMERINTAHAN DESA				
1	Musyawarah Desa	a. Pelaksanaan Musyawarah Desa	2	1
		b. Peserta Musyawarah Desa:		
		- Keterwakilan unsur masyarakat	2	1
		- Keterwakilan unsur Pemerintah Desa	2	1
		- Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa	2	1
		- Waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		
		1) setelah bulan Juni tahun berjalan	2	1
		2) sampai dengan bulan Juni tahun berjalan	2	1
		c. Materi yang dibahas di Musyawarah Desa:		
		- Penataan Desa	2	1
		- Perencanaan Pembangunan Desa	2	1
		- Peraturan Desa tentang RPJMDesa	2	1
		- Peraturan Desa tentang RKPDesa	2	1
		- Peraturan Desa tentang APBDesa	2	1
		- Kerjasama Desa:		
		1) Kerjasama antar Desa	2	1
		2) Kerjasama dengan pihak ketiga	2	1
- Pembentukan Bumdes				
1) Perdes tentang Pembentukan BUMDesa	2	1		
2) Penyertaan modal BUMDesa	2	1		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JAWABAN	
			ADA	TDK ADA
		3) AD/ART	2	1
		4) Rapat pertanggungjawaban	2	1
		5) Aturan terkait dengan kepailitan	2	1
		6) Struktur organisasi BUMDesa	2	1
		- Aset Desa		
		1) Inventarisasi	2	1
		2) Penambahan	2	1

		3) Pelepasan	1	2
2	Badan Permusyawaratan Desa	Sarana dan Prasarana:		
		- Ruang kerja	2	1
		- Operasional dan tunjangan	2	1
		- Buku data keputusan	2	1
		- Buku data anggota	2	1
		- Buku data kegiatan	2	1
		- Buku sekretariat	2	1
		- Mesin ketik/komputer	2	1
		- Printer	2	1
		- Peraturan Tata Tertib BPDes	2	1
3	Pemerintah Desa	a. Gedung kantor		
		ADA, DI RUMAH PRIBADI		1
		ADA, SEWA		2
		ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN		3
		ADA, MILIK DESA, PERMANEN		4
		b. Gedung Pertemuan/Balai Desa		
		TIDAK ADA		1
		ADA, SEWA		2
		ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN		3
		ADA, MILIK DESA, PERMANEN		4
		c. Perangkat Desa		
		- Jumlah Kepala Urusan (Kaur)		
		1 KAUR		1
		2 KAUR		2
		- Jumlah Kepala Seksi (Kasi)		
		2 KEPALA SEKSI		1
		3 KEPALA SEKSI		2
		Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi:		
		SLTA/SEDERAJAT (KURANG ATAU SAMA DENGAN 5%)		1
		SLTA KE ATAS (DI ATAS 5%)		2
		d. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)	2	1
		e. Pengaturan Kewenangan		
		- Perdes Kewenangan asal usul	2	1
		- Perdes Kewenangan lokal skala Desa	2	1
		- Perdes Kewenangan yang ditugaskan	2	1
		BELUM DENGAN ORDINAT	1	
		SUDAH DENGAN ORDINAT	4	
- Luas wilayah				
BELUM DITENTUKAN		1		
SUDAH DITENTUKAN		4		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
		- Siltap Kades dan Perangkat (Nilai besarannya):		
		DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN	1	
		DI ATAS UPAH MINIMUM KABUPATEN	4	
		- Berapa Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun		
		1 SAMPAI 3	1	
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 4	2	
		- Berapa peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun:		
		1	1	
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 2	2	
		- Berapa Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun:		
		1	1	
		1 SAMPAI 3	3	
		LEBIH DARI 3	4	
		- Pernah menjadi juara lomba desa		
		TIDAK PERNAH	1	
		PERNAH, TINGKAT KECAMATAN	2	
		PERNAH, TINGKAT KABUPATEN/KOTA	3	
		PERNAH, TINGKAT PROVINSI	4	
		PERNAH, TINGKAT REGIONAL/NASIONAL	5	
		- Pernah tidaknya menjadi <i>Lab site</i> dari Kementerian/Lembaga (K/L)	2	1
		Berapa kali dalam setahun Desa menerima Bimbingan Teknis dari		
		1) Pemerintah Pusat		
		TIDAK PERNAH	1	
		PERNAH 1 KALI	2	
		PERNAH 2-4	3	
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI	4	
		2) Pemerintah Provinsi		
		TIDAK PERNAH	1	
		PERNAH 1 KALI	2	
		PERNAH 2-4	3	
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI	4	
		3) Pemerintah Kabupaten/Kota		
		TIDAK PERNAH	1	

		PERNAH 1 KALI	2	
		PERNAH 2-4	3	
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI	4	
		f. Jaringan Listrik	2	1
		g. Sumber Daya Listrik (PLN)		
		TIDAK STABIL	1	
		STABIL	2	
		h. Sumber Daya Listrik (NON-PLN)		
		TIDAK STABIL	1	
		STABIL	2	
		i. Perpustakaan	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
4	Administrasi Desa	a. Administrasi Umum		
		b. Administrasi Kependudukan		
		c. Administrasi Keuangan		
		d. Administrasi Pembangunan		
		e. Administrasi BPDes		
		f. Administrasi Lainnya		
		ADA 1	1	
		ADA 2	2	
		ADA 3	3	
		ADA 4	4	
		ADA 5	5	
LENGGAP	6			
5	Keuangan Desa	a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Dana Desa (DD)		
		50% KE BAWAH	1	
		DI ATAS 50%	4	
		b. Laporan Dana Desa (DD)	2	1
		c. Alokasi Dana Desa (ADD)	2	1
		d. Hibah/sumbangan pihak ketiga	2	1
		e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota	2	1
		f. Bantuan Keuangan Provinsi	2	1
		g. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah	2	1
		h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Belanja Pembangunan	2	1
		30% KE ATAS	1	
KURANG DARI 30%	2			
i. SiLPA				

		- SiLPA total		
		SAMA DENGAN ATAU DI ATAS 30%	1	
		KURANG 30%	4	
		- SiLPA Dana Desa		
		SAMA DENGAN ATAU DI ATAS 30%	1	
		KURANG 30%	4	
		j. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan	2	1
		k. Penyertaan modal Desa	2	1
6	Akuntabilitas, Pembinaan dan Pengawasan	a. Laporan Kades kepada Pemerintahan atasan		
		- Laporan penyaluran dan realisasi penggunaan Dana Desa	2	1
		- Laporan pertanggungjawaban APBDesa	2	1
		- Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa Perdes	2	1
		b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD	2	1
		c. Penyampaian informasi kepada masyarakat (terkait materi secara umum).	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
II. KINERJA				
1	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat		
		- Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa)	2	1
		- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir	2	1
		- Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat	2	1
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat		
		Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat	2	1
		c. Pembinaan Kemasyarakatan		
		- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir	2	1
		- <i>Reward</i> bagi perangkat dan	2	1

		kelompok masyarakat		
		d. Budaya Kerja		
		- apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin	2	1
		- apakah telah memiliki standar jam pelayanan	2	1
		- apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat	2	1
III. INISIATIF DAN KREATIFITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Inisiatif dan kreatifitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat	2	1
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat:	2	1
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur	2	1
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa)	2	1
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa)	2	1
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa)	2	1
IV. DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI / e-GOVERNMENT				
1	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet	2	1
		b. Website Desa	2	1
2	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet	2	1
		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
3	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi		
		- Administrasi umum	2	1

		- Administrasi kependudukan	2	1
		- Administrasi keuangan	2	1
		- Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa)	2	1
		- Administrasi pembangunan	2	1
		- Administrasi lainnya	2	1
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi	2	1
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW	2	1
		d. Perpustakaan <i>online</i>	2	1
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i>	2	1
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA				
1	Pelestarian adat dan budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya	2	1
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya	2	1
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat	2	1
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat	2	1
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat	2	1

B. Bidang Kewilayahan

Tabel 2: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Kewilayahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
I. IDENTITAS DESA				
1	Nama	:		
2	Kode	:		
3	Tipologi	1. Pantai 2. Dataran rendah 3. Pertanian		
4	Orbitasi Wilayah ke Kabupaten/Kota (LINGKARI YANG SESUAI)	1. Lebih dari 6 jam 2. 5-6 jam 3. 3-4 jam 4. 1-2 jam 5. Kurang dari 1 jam		
5	Kondisi wilayah	1. Ada di Ibukota kecamatan/di luar Ibukota kecamatan 2. Rawan Bencana/Tidak		
II. BATAS DESA				
1	Batas Desa			

2	Penetapan batas dengan ordinat			
3	Komposisi Umur			
	< 15 Tahun			
	> 15 tahun sd 56 tahun			
	> dari 56 tahun			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
4	Jumlah penduduk menurut gender			
	Jumlah penduduk total			
	Jumlah penduduk laki-laki			
	Jumlah penduduk perempuan			
	Jumlah kepala keluarga			
III. INOVASI				
1	Embrio aktivitas inovasi	a. Adanya produk unggulan.	2	1
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan.	2	1
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif.	2	1
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif.	2	1
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi.	2	1
2	Kelembagaan inovasi	a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i>).	2	1
		b. Adanya peta rencana (<i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa	2	1
3	Jejaring inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi	2	1

		masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes).		
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan.	2	1
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan.	2	1
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan.	2	1
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi.	2	1
4	Budaya inovasi masyarakat	a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir.	2	1
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.	2	1
		c. Lembaga penyedia teknologi.	2	1
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk.	2	1
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk.	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
5	Keterpaduan perencanaan inovasi	a. Adanya integrasi antara peta rencana (<i>roadmap</i>) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah).	2	1
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Penataan Wilayah(SIDa).	2	1
6	Kepekaan masyarakat terhadap dinamika	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan	2	1
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan	2	1

	global/ekonomi	konsumen/pasar		
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan	2	1
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (<i>Heksagonal</i>)	2	1
7	Faktor-faktor kunci dalam pengelolaan potensi inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan	2	1
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan	2	1
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya	2	1
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan	2	1
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga	2	1
		f. Pelatihan Kewirausahaan	2	1
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan	2	1
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA				
1	Perencanaan kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana	2	1
2	Peta resiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya	2	1
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini	2	1
3	Sistem peringatan dini terpusat pada masyarakat	a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir	2	1
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana	2	1
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan	2	1
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana	2	1
		e. Alat deteksi dini bencana	2	1
4	Infrastruktur evakuasi	a. Tempat Evakuasi	2	1
		b. Jalur Evakuasi	2	1
		c. Sarana Evakuasi	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
V. PENGATURAN INVESTASI				
1	Investasi yang masuk	a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir	2	1
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan	2	1
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan	2	1
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian	2	1
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa)	2	1

C. Bidang Kemasyarakatan

Tabel 3: Daftar Pertanyaan Kuesioner Bidang Kemasyarakatan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
I. PARTISIPASI MASYARAKAT				
1	Musyawarah dusun	a. Partisipasi Masyarakat	5	1
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan		
		TIDAK SEIMBANG		1
		SEIMBANG		3
2	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat	2	1
3	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat	2	1
4	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas GotongRoyong Penduduk	4	1

II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN				
1	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda	2	1
2	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi	2	1
3	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga	2	1
4	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM	2	1
5	Kelompok Gotong Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong	2	1

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
6	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna		
7	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	2	1
8	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha	2	1
9	Koperasi	Memiliki Koperasi	4	1
10	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan	2	1
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Lembaga PKK	Keberadaan PKK	4	1
2	Program PKK	Realisasi 1 Program Pokok	2	1
3	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja	2	1
		Kelengkapan Kelompok Dasawisma	2	1
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	Pengamanan lingkungan dan manusia	a. Kerja sama pelestarian lingkungan	2	1
		b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa	2	1
		c. Kerja sama pendaur ulangan limbah	2	1
		d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas)	2	1
		e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan)	2	1
2	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok	1	4

.		b. Konflik antar suku	1	4
		c. Konflik berbau agama/kepercayaan	1	4
		d. Konflik antar RAS	1	4
3	Perkelahian	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir	1	4
4	Pencurian dan perampokan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa	1	2
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan	1	2
5	Perjudian	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus	1	2
6	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa	1	4
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba	1	4
7	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus	1	4
8	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan	1	4
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk desa setempat	1	4
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat	1	4
9	Kekerasan seksual	Jumlah kasus perkosaan	1	4
10	Kekerasan dalam keluarga	a. Kekerasan terhadap anak	1	4
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya	1	4
11	Penculikan	Jumlah kasus penculikan	1	4
12	HIV/Aids	Kasus HIV/AIDS	1	4

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
V. PENDIDIKAN				
1	Buta huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis	1	4
2	Putus sekolah	a. Jml Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat		
		KURANG DARI 1%	4	
		LEBIH DARI 1%	1	
		b. Jml Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat		

		KURANG DARI 1%	4	
		LEBIH DARI 1%	1	
3	Tamat sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat		
		KURANG DARI 1%	1	
		LEBIH DARI 1%	4	
		b. Jumlah penduduk tamat D3/Sarjana muda		
		KURANG DARI 1%	1	
		LEBIH DARI 1%	4	
		c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/S-1		
		KURANG DARI 1%	1	
		LEBIH DARI 1%	4	
		d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana		
		KURANG DARI 1%	1	
		LEBIH DARI 1%	4	
VI. KESEHATAN				
1	Kematian bayi	Jumlah Kematian Bayi		
		PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1	
		PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	4	
2	Gizi dan kematian balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk		
		PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1	
		PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	2	
		b. Jumlah Balita Meninggal		
		KURANG DARI 1%	2	
		DI ATAS 1%	1	
3	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu		
		TIDAK ADA	1	
		ADA	4	
		b. Kelembagaan		
		PRATAMA	1	
		DI ATAS PRATAMA	4	
4	Kepemilikan jamban dalam rumah tangga	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri		
		MENURUN	1	
		TETAP	2	
		MENINGKAT	3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri		
		MENURUN	3	

	TETAP	2	
	MENINGKAT	1	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENILAIAN	
			ADA	TDK ADA
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali		
		MENURUN	3	
		TETAP	2	
		MENINGKAT	1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih		
		MENURUN	3	
		TETAP	2	
		MENINGKAT	1	
5	Fasilitas kesehatan lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan	2	1
		b. Bidan/Mantri/Dokter	2	1
		c. Jamban Keluarga/MCK	2	1
VII. EKONOMI				
1	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja		
		KURANG DARI 10%	4	
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	1	
2	Mata Pencarian / Sumber Pendapatan (Checklist mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian		
		Industri		
		Jasa		
3	Kelembagaan ekonomi	a. Pasar Tradisional	2	
		b. Toko/Kios	2	
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya	2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
1	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin	2	
2	Program Penanggulangan	Program Penanggulangan Kemiskinan	2	

	Kemiskinan			
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT				
	Analisa kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2	
		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat		
		1 SAMPAI 3	1	
		LEBIH DARI 3	2	
	Pelaksanaan program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat		
		1 SAMPAI 3	1	
		LEBIH DARI 3	2	

3.5. TEKNIK ANALISA DATA

Analisis data rencananya akan dilakukan secara paralel selama kegiatan penelitian berlangsung. Analisis data sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data sampai penulisan laporan akhir. Tahapan-tahapan analisis data meliputi:

- 1) Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal yang berkaitan langsung dengan analisis studi, mencari tema dan pola. Melalui reduksi data diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data tambahan jika diperlukan.
- 2) Penghitungan skor, yaitu menghitung skor yang dihasilkan dari kuesioner yang disebar dan menentukan kriteria hasil skor sebagai berikut:

NO.	POIN	KATEGORI
1.	0 Sampai dengan 33	Buruk
2.	34 sampai dengan 64	Sedang
3.	64 sampai dengan 100	Baik

- 3) Penyajian data, yaitu menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti percakapan, narasi, deskriptif situasi sosial. Data penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi.
- 4) Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran atas data yang diperoleh selama kegiatan kajian.
- 5) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dan mengecek ulang data-data yang telah direduksi dan

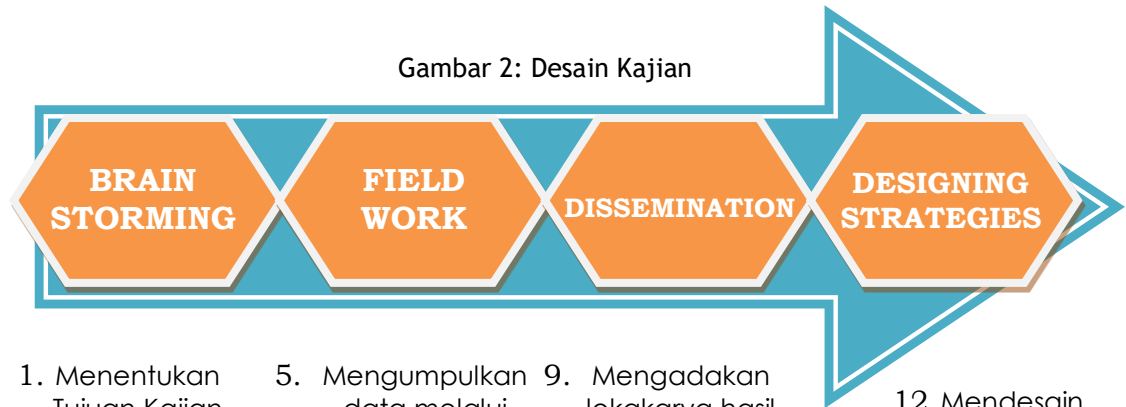
disajikan. Kesimpulan-Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara (1) memikirkan ulang selama penulisan (2) tinjau ulang pada catatan-catatan lapang, (3) peninjauan kembali dan diskusi antar teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan temuan dalam seperangkat data.

3.6. DESAIN KAJIAN

Kajian Penataan Wilayah Kabupaten Indramayu disusun dengan desain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) disusun untuk menguraikan latar belakang perlunya kajian, maksud dan tujuan kajian, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan sumber pembiayaan kegiatan.
- 2) Survey (*Field Work*)
Field work dilakukan melalui kegiatan survey lapangan dengan memobilisasi tenaga pendata untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 3) Analisa Hasil Kajian
Data dan informasi yang dihasilkan melalui survey lapangan kemudian dianalisa sebagai hasil kajian.
- 4) Diseminasi Hasil Kajian
Hasil kajian dilokakaryakan dengan mengundang *stakeholders* terkait untuk menerima saran perbaikan dan menentukan rencana kerja dan tindak lanjut kegiatan agar hasil kajian dapat bermanfaat.
- 5) Penyusunan Laporan Hasil Kajian
Hasil kajian disusun sebagai laporan akhir kegiatan sekaligus juga sebagai output kegiatan Kajian Penataan Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Gambar 2: Desain Kajian



1. Menentukan Tujuan Kajian
2. Menyusun daftar kuesioner dan wawancara
3. Menerapkan study literatur, konsep dan dokumen
4. Mengidentifikasi populasi untuk menjadi sumber data
5. Mengumpulkan data melalui survey lapangan
6. Mengolah dan menganalisa data hasil temuan di lapangan
7. Menyimpulkan temuan di lapangan
8. Menyusun saran-saran
9. Mengadakan lokakarya hasil kajian dengan mengundang *stakeholders*
10. Menerima masukan saran perbaikan
11. Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut kegiatan
12. Mendesain strategi pelaksanaan
13. Mendokumentasikan hasil kajian agar dijadikan pembelajaran (*lesson learned*)

BAB IV. ANALISA KAJIAN

4.1 Deskripsi Data Bidang Pemerintahan

4.1.1 Pemerintahan Desa

Pada aspek bidang pemerintahan desa terdapat beberapa point yang melandasi penilaian sebagai bahan kajian musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, administrasi desa, keuangan desa dan akuntabilitas, pembinaan dan pengawasan

Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai gambaran kondisi pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4: Capaian Pemerintah Desa

No	Kecamatan	Skor	Kategori
1	Pasekan	66,66	sedang
2	Lelea	68,35	baik
3	Gabus Wetan	70,97	baik
4	Sindang	71,35	baik
5	Tukdana	73,97	baik
6	Gantar	74,02	baik
7	Terisi	74,16	baik
8	Indramayu	75,09	baik
9	Cikedung	75,47	baik
10	Sukra	76,18	baik
11	Losarang	76,21	baik
12	Slieg	76,59	baik
13	Balongan	77,34	baik
14	Karangampel	78,46	baik
15	Anjatan	79,08	baik
16	Lohbener	79,78	baik

17	Patrol	79,93	baik
18	Bongas	81,08	baik
19	Kedokan Bunder	81,27	baik
20	Haurgeulis	81,54	baik
21	Jatibarang	82,39	baik
22	Arahan	83,52	baik
23	Sukagumiwang	84,08	baik
24	Juntinyuat	84,64	baik
25	Bangodua	86,14	baik
26	Krangkeng	87,45	baik
27	Kertasmaya	87,83	baik
28	Kroya	88,57	baik
29	Kandanghaur	89,89	baik
30	Cantigi	90,63	baik
31	Widasari	92,51	baik
rata-rata		80,17	baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Pasekan dengan skor 66,66 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Widasari yakni 92,51 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 80,17 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa musyawarah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, administrasi desa, keuangan desa, akuntabilitas, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik.

4.1.2 Kinerja

Kinerja dalam konteks kajian ini merujuk pada strategi dalam pemberdayaan masyarakat, kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan

budaya kerja yang dicapai oleh pemerintah desa. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai gambaran kondisi kinerja pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5: Kinerja Pemerintahan Desa

No	Kecamatan	Skor	Kategori
1	Indramayu	51,83	sedang
2	Balongan	57,39	sedang
3	Pasekan	59,22	sedang
4	Sindang	62,94	sedang
5	Gantar	63,56	Sedang
6	Karangampel	64,78	Sedang
7	Terisi	66,67	Sedang
8	Losarang	66,67	Sedang
9	Sukra	70,05	Baik
10	Kroya	70,33	Baik
11	Patrol	71,20	Baik
12	Lohbener	72,22	Baik
13	Widasari	72,22	Baik
14	Slieg	75,89	Baik
15	Sukagumiwang	77,78	Baik
16	Cantigi	79,61	Baik
17	Cikedung	79,61	Baik
18	Bongas	79,61	Baik
19	Kedokan Bunder	81,44	Baik
20	Jatibarang	81,44	Baik
21	Arahan	83,33	Baik
22	Anjatan	83,33	Baik
23	Lelea	83,33	Baik

24	Kandanghaur	83,33	Baik
25	Gabus Wetan	85,17	Baik
26	Haurgeulis	86,81	Baik
27	Krangkeng	88,89	Baik
28	Tukdana	90,72	Baik
29	Juntinyuat	92,56	Baik
30	Bangodua	92,56	Baik
31	Kertasmaya	94,44	Baik
rata-rata		76,69	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Indramayu dengan skor 51,83 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Kertasmaya yakni 94,44 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 76, 69 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dilihat dari aspek strategi dalam pemberdayaan masyarakat, kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan budaya kerja dapat dinyatakan baik.

4.1.3 Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks kajian ini merujuk inisiatif dan kreatifitas pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai gambaran Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 6: Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

No	Kecamatan	Skor	Kategori
1	Sindang	61,11	Sedang
2	Cantigi	63,89	Sedang
3	Indramayu	69,44	Baik
4	Balongan	69,44	Baik
5	Pasekan	75	Baik
6	Karangampel	77,78	Baik
7	Arahan	80,56	Baik
8	Juntinyuat	80,56	Baik
9	Gantar	80,56	Baik
10	Sukra	80,56	Baik
11	Lelea	80,56	Baik
12	Lohbener	83,33	Baik
13	Sukagumiwang	83,33	Baik
14	Tukdana	83,33	Baik
15	Gabus Wetan	83,33	Baik
16	Kedokan Bunder	88,89	Baik
17	Patrol	88,89	Baik
18	Slieg	88,89	Baik
19	Jatibarang	88,89	Baik
20	Losarang	88,89	Baik
21	Anjatan	90,11	Baik
22	Bangodua	91,67	Baik
23	Haurgeulis	92,50	Baik
24	Widasari	94,44	Baik
25	Cikedung	94,44	Baik
26	Kroya	94,44	Baik
27	Krangkeng	97,22	Baik
28	Kertasmaya	97,22	Baik
29	Terisi	97,22	Baik

30	Kandanghaur	97,22	Baik
31	Bongas	100	Sempurna
rata-rata		85,04	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Sindang dengan skor 61,11 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Bongas yakni 100 dengan kriteria sangat baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 85,04 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan baik.

4.1.4 Desa Berbasis Teknologi Informasi / e-Government

Desa berbasis teknologi informasi / e-Government dalam konteks kajian ini merujuk pada ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet, perangkat komputer dan Administrasi. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai desa berbasis teknologi informasi / e-Government pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 7: Desa Berbasis Teknologi Informasi / e-Government

No	Kecamatan	Skor	Kategori
1	Bongas	55,95	Sedang
2	Jatibarang	65,48	Baik
3	Widasari	65,48	Baik
4	Losarang	65,48	Baik
5	Sindang	66,67	Baik
6	Krangkeng	66,67	Baik
7	Kedokan Bunder	67,86	Baik

8	Sukagumiwang	69,05	Baik
9	Terisi	71,43	Baik
10	Gantar	71,91	Baik
11	Karangampel	72,62	Baik
12	Pasekan	73,81	Baik
13	Sukra	74,51	Baik
14	Balongan	75,00	Baik
15	Patrol	75,00	Baik
16	Slieg	75,00	Baik
17	Indramayu	76,19	Baik
18	Cikedung	76,19	Baik
19	Lelea	78,57	Baik
20	Kandanghaur	78,57	Baik
21	Anjatan	79,23	Baik
22	Lohbener	79,76	Baik
23	Tukdana	80,95	Baik
24	Gabus Wetan	80,95	Baik
25	Haurgeulis	81,56	Baik
26	Arahan	83,33	Baik
27	Juntinyuat	83,33	Baik
28	Cantigi	85,71	Baik
29	Kroya	85,71	Baik
30	Bangodua	88,10	Baik
31	Kertasmaya	89,29	Baik
	rata-rata	75,27	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Bongas dengan skor 55,95 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Kertasmaya yakni 89,29 dengan kriteria baik. Adapun rata-rata skor yang di dapat adalah 75,27 dengan kriteria baik.

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi / e-Government oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dilihat dari aspek ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet, perangkat komputer dan administrasi dapat dinyatakan baik.

4.1.5 Pelestarian Adat dan Budaya

Pelestarian adat dan budaya dalam konteks kajian ini merujuk pada pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya, keterlibatan kelembagaan adat dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan seni budaya setempat, kebijakan menjaga kelestarian adat dan alokasi anggaran pelestarian adat. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai pelestarian adat dan budaya pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 8: Pelestarian Adat dan Budaya

No	Kecamatan	Skor	Kategori
1	Pasekan	80,00	Baik
2	Jatibarang	80,00	Baik
3	Widasari	83,33	Baik
4	Kertasmaya	83,33	Baik
5	Losarang	83,33	Baik
6	Sindang	86,67	Baik
7	Kedokan Bunder	86,67	Baik
8	Bangodua	86,67	Baik
9	Terisi	86,67	Baik
10	Balongan	90,00	Baik
11	Cantigi	90,00	Baik
12	Sukra	90,00	Baik
13	Krangkeng	90,00	Baik

14	Juntaryuat	90,00	Baik
15	Slieg	90,00	Baik
16	Patrol	90,00	Baik
17	Sukagumiwang	90,00	Baik
18	Haurgeulis	90,00	Baik
19	Anjatan	90,00	baik
20	Kandanghaur	90,00	Baik
21	Gantar	91,30	baik
22	Indramayu	93,33	Baik
23	Arahan	93,33	Baik
24	Bongas	93,33	Baik
25	Kroya	93,33	Baik
26	Lohbener	96,67	Baik
27	Karangampel	96,67	Baik
28	Tukdana	96,67	Baik
29	Cikedung	96,67	Baik
30	Lelea	100,00	Sempurna
31	Gabus Wetan	100,00	Sempurna
rata-rata		90,26	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Pasekan dengan skor 80,00 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Gabus Wetan dan Kertasmaya yakni 100 dengan kriteria sempurna. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 90,26 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa pelestarian adat dan budaya oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dilihat dari aspek pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya, keterlibatan kelembagaan adat dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan seni budaya setempat, kebijakan

menjaga kelestarian adat dan alokasi anggaran pelestarian adat dapat dinyatakan baik.

Data skor gabungan dari lima aspek bidang yakni pemerintah desa, kinerja, inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi informasi/e-government dan pelestarian adat budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9: Bidang Pemerintahan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Sindang	69,75	Baik
2	Pasekan	70,95	Baik
3	Indramayu	73,18	Baik
4	Balongan	73,84	Baik
5	Losarang	76,12	Baik
6	Karangampel	78,07	Baik
7	Jatibarang	79,06	Baik
8	Terisi	79,23	Baik
9	Sukagumiwang	80,85	Baik
10	Kedokan Bunder	81,23	Baik
11	Slieg	81,28	Baik
12	Gantar	81,51	Baik
13	Widasari	81,60	Baik
14	Cantigi	81,97	Baik
15	Bongas	82,00	Baik
16	Patrol	82,00	Baik
17	Sukra	82,10	Baik
18	Lelea	82,16	Baik
19	Lohbener	82,35	Baik
20	Haurgeulis	83,90	Baik
21	Gabus Wetan	84,09	Baik
22	Anjatan	84,31	Baik

23	Cikedung	84,48	Baik
24	Arahan	84,82	Baik
25	Tukdana	85,13	Baik
26	Krangkeng	86,05	Baik
27	Juntinyuat	86,23	Baik
28	Kroya	86,49	Baik
29	Kandanghaur	87,80	Baik
30	Bangodua	89,03	Baik
31	Kertasmaya	90,42	Baik
Rata-Rata		81,47	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Sindang dengan skor 69,75 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Kertasmaya dengan skor 91,42 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 81,47 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa kegiatan pemerintah desa, kinerja perangkat desa, inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi/e-government dapat dinyatakan baik.

Dari tiap indikatornya dalam aspek bidang pemerintahan di dapat data sebagai berikut:

Tabel 10: Indikator Aspek Bidang Pemerintahan

Aspek Bidang	Skor
Desa Berbasis Teknologi Informasi/e- Government	75,27
Kinerja	76,69
Pemerintah Desa	80,17
Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam	85,54

Pemberdayaan Masyarakat	
Pelestarian Adat dan Budaya	90,26
Rata-Rata	81,58

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dalam melakukan kegiatan pelayanan. Adapun skornya adalah 75,27 dengan kategori baik. Skor tertinggi terdapat di pelestarian adat dan budaya oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dengan skor 90,26 dengan kategori baik. Adapun rata-rata skornya adalah 81,58 dengan kategori baik. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan bahwa aspek pemerintahan pada desa di Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan baik.

4.2 Deskripsi Data Bidang Kewilayahan

4.2.1 Inovasi

Inovasi dalam konteks kajian ini merujuk pada embrio aktivitas inovasi, kelembagaan inovasi, jejaring inovasi, budaya inovasi masyarakat, keterpaduan perencanaan inovasi, kepekaan masyarakat terhadap dinamika global/ekonomi dan faktor-faktor kunci dalam pengelolaan potensi inovatif. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai inovasi pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 11: Inovasi

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Bongas	39,44	Buruk

2	Terisi	49,44	Buruk
3	Pasekan	50,00	Sedang
4	Jatibarang	50,00	Sedang
5	Kandanghaur	50,00	Sedang
6	Gabus Wetan	50,56	Sedang
7	Sindang	51,11	Sedang
8	Gantar	51,28	Sedang
9	Losarang	51,67	Sedang
10	Balongan	53,33	Sedang
11	Bangodua	53,33	Sedang
12	Partol	54,74	Sedang
13	Karangampel	55,56	Sedang
14	Kroya	56,11	Sedang
15	Cikedung	57,22	Sedang
16	Indramayu	57,78	Sedang
17	Juntinyuat	60,56	sedang
18	Sukra	60,93	Sedang
19	Krangkeng	61,11	sedang
20	Anjatan	61,11	Sedang
21	Sukagumiwang	61,11	Sedang
22	Haurgeulis	62,88	Sedang
23	Kertasmaya	63,89	Sedang
24	Slieg	64,44	Baik
25	Lelea	66,11	Baik
26	Lohbener	70,00	Baik
27	Arahan	70,56	Baik
28	Cantigi	74,44	Baik
29	Kedokan Bunder	75,56	Baik
30	Tukdana	75,56	Baik
31	Widasari	77,22	Baik
Rata-Rata		59,47	Sedang

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Bongas dengan skor 39.44 dengan kriteria buruk dan tertinggi di Kecamatan Widasari dengan skor 77,22 dengan kriteria baik. Adapapun rata-rata skor yang di dapat adalah 59,47 dengan kriteria sedang. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek inovasi yang meliputi embrio aktivitas inovasi, kelembagaan inovasi, jejaring inovasi, budaya inovasi masyarakat, keterpaduan perencanaan inovasi, kepekaan masyarakat terhadap dinamika global/ekonomi dan faktor-faktor kunci dalam pengelolaan potensi inovatif dinyatakan sedang.

4.2.2 Tanggap dan Siaga Bencana

Tanggap dan siaga bencana dalam konteks kajian ini merujuk pada perencanaan kontingensi, peta resiko bencana, sistem peringatan dini terpusat pada masyarakat dan infrastruktur evakuasi. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai tanggap dan siaga bencana pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 12: Tanggap dan Siaga Bencana

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Indramayu	50,00	Sedang
2	Balongan	50,00	Sedang
3	Sindang	50,00	Sedang
4	Pasekan	50,00	Sedang
5	Arahan	50,00	Sedang
6	Jatibarang	50,00	Sedang
7	Gantar	50,00	Sedang
8	Bangodua	50,00	Sedang

9	Terisi	50,00	Sedang
10	Patrol	50,00	Sedang
11	Kandanghaur	50,00	Sedang
12	Sukra	50,00	Sedang
13	Bongas	50,00	Sedang
14	Kroya	50,00	Sedang
15	Cantigi	51,52	Sedang
16	Karangampel	51,52	Sedang
17	Cikedung	51,52	Sedang
18	Losarang	51,52	Sedang
19	Tukdana	53,03	Sedang
20	Anjata	55,71	Sedang
21	Kertasmaya	56,06	Sedang
22	Juntinyuat	57,58	Sedang
23	Haurgeulis	58,17	Sedang
24	Krangkeng	59,09	Sedang
25	Kedokan Bunder	59,09	Sedang
26	Lelea	60,61	Sedang
27	Sukagumiwang	62,12	Sedang
28	Gabus Wetan	66,67	Baik
29	Lohbener	68,18	Baik
30	Widasari	68,18	Baik
31	Slieg	71,21	Baik
Rata-rata		55,30	Sedang

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Indramayu, Balongan, Sindang, Pasekan, Arahan, Jatibarang, Bangodua, Terisi, Kandang Haur, Bongas Kroya dengan skor 50,00 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Slieg dengan skor 71,21 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor

yang di dapat adalah 55,30 dengan kriteria sedang. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek tanggap dan siaga bencana yang meliputi perencanaan kontingensi, peta resiko bencana, sistem peringatan dini terpusat pada masyarakat dan infrastruktur evakuasi dinyatakan sedang.

4.2.3 Pengaturan Investasi

Pengaturan investasi dalam konteks kajian ini merujuk pada investasi yang masuk. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai pengaturan investasi pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 13: Pengaturan Investasi

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Kedokan Bunder	50,00	Sedang
2	Terisi	50,00	Sedang
3	Gabus Wetan	50,00	Sedang
4	Karangampel	53,33	Sedang
5	Kertasmaya	53,33	Sedang
6	Pasekan	56,67	Sedang
7	Lohbener	56,67	Sedang
8	Sukagumiwang	56,67	Sedang
9	Bangodua	56,67	Sedang
10	Tukdana	56,67	Sedang
11	Indramayu	60,00	Sedang
12	Balongan	60,00	Sedang
13	Patrol	60,00	Sedang
14	Sindang	60,00	Sedang
15	Sukra	60,00	Sedang
16	Cantigi	60,00	Sedang

17	Gantar	60,00	Sedang
18	Anjatan	60,00	Sedang
19	Krangkeng	60,00	Sedang
20	Juntinyuat	60,00	Sedang
21	Lelea	60,00	Sedang
22	Losarang	63,33	Sedang
23	Arahan	66,67	Sedang
24	Haurgeulis	66,67	Sedang
25	Jatibarang	66,67	Sedang
26	Cikedung	66,67	Sedang
27	Kandanghaur	66,67	Sedang
28	Bongas	66,67	Sedang
29	Kroya	66,67	Sedang
30	Slieg	76,67	Baik
31	Widasari	76,67	Baik
Rata-Rata		60,64	Sedang

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Kedokan Bunder, Terisi dan Gabus Wetan dengan skor 50,00 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Widasari dengan skor 76,67 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 60,64 dengan kriteria sedang. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek pengaturan investasi dalam hal ini investasi yang masuk dinyatakan sedang.

Data skor gabungan dari tiga aspek bidang kewilayahan yakni inovasi, tanggap dan siaga bencana dan pengaturan investasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14: Bidang Kewilayahan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Bongas	42,75	Sedang
2	Terisi	49,64	Sedang
3	Pasekan	50,72	Sedang
4	Sindang	51,81	Sedang
5	Jatibarang	51,81	Sedang
6	Kandanghaur	51,81	Sedang
7	Bangodua	52,90	Sedang
8	Losarang	52,90	Sedang
9	Balongan	53,26	Sedang
10	Karangampel	54,35	Sedang
11	Kedokan Bunder	54,35	Sedang
12	Patrol	54,35	Sedang
13	Sukra	54,35	Sedang
14	Gabus Wetan	54,35	Sedang
15	Juntinyuat	55,80	Sedang
16	Kroya	55,80	Sedang
17	Indramayu	56,16	Sedang
18	Cikedung	56,88	Sedang
19	Gantar	58,53	Sedang
20	Anjatan	59,10	Sedang
21	Krangkeng	60,51	Sedang
22	Haurgeulis	60,51	Sedang
23	Kertasmaya	60,87	Sedang
24	Sukagumiwang	60,87	Sedang
25	Lelea	64,13	Baik
26	Arahan	65,22	Baik
27	Tukdana	66,67	Baik
28	Cantigi	67,39	Baik
29	Slieg	67,39	Baik

30	Lohbener	68,12	Baik
31	Widasari	75,00	Baik
Rata-Rata		57,75	Sedang

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Bongas dengan skor 42,75 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Widasari dengan skor 75,00 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 57,75 dengan kriteria sedang. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek kewilayahan yang meliputi inovasi, tanggap sdan siaga bencana dan investasi masuk pada desa di Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan sedang.

Dari tiap indikatornya dalam aspek bidang kewilayahan di dapat data sebagai berikut:

Tabel 15: Indikator Aspek Bidang Kewilayahan

Aspek Bidang	Skor
Tanggap dan Siaga Bencana	55,30
Inovasi	59,47
Pengaturan Investasi	60,64
Rata-Rata	58,47

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah adalah tanggap dan siaga bencana oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dengan skor 55,30 dengan dengan kategori sedang. Skor tertinggi terdapat pada pengaturan investasi oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dengan skor 60,64 dengan kategori sedang. Adapun rata-rata skornya adalah 58,47dengan kategori sedang. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan bahwa aspek kewilayahan pada desa di Kabupaten Indramayu dinyatakan sedang.

4.3 Deskripsi Data Bidang Kemsyarakatan

4.3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam konteks kajian ini merujuk pada musyawarah dusun, gotong royong penduduk desa, swakelola masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana dan swadaya masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 16: Partisipasi Masyarakat

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Bongas	64,56	Baik
2	Widasari	66,67	Baik
3	Tukdana	66,67	Baik
4	Gabus Wetan	68,75	Baik
5	Indramayu	70,83	Baik
6	Sindang	70,83	Baik
7	Pasekan	70,83	Baik
8	Arahan	75,00	Baik
9	Kandanghaur	75,00	Baik
10	Sukra	76,88	baik
11	Balongan	79,17	baik
12	Patrol	79,17	Baik
13	Cantigi	79,17	Baik
14	Lohbener	79,17	Baik
15	Krangkeng	79,17	Baik
16	Kedokan Bunder	79,17	Baik
17	Juntinyuat	81,25	Baik
18	Losarang	81,25	Baik

19	Haurgeulis	82,35	Baik
20	Gantar	83,82	Baik
21	Bangodua	83,33	Baik
22	Karangampel	85,42	Baik
23	Anjatan	86,10	Baik
24	Jatibarang	87,50	Baik
25	Kroya	87,50	Baik
26	Slieg	89,58	Baik
27	Terisi	89,58	Baik
28	Lelea	91,67	Baik
29	Kertasmaya	95,83	Baik
30	Sukagumiwang	95,83	Baik
31	Cikedung	95,83	Baik
Rata-Rata		80,37	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Bongas dengan skor 64,56 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Cikedung dengan skor 95,83 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 80,37 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam hal ini musyawarah dusun, gotong royong penduduk desa, swakelola masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana dan swadaya masyarakat untuk pembangunan sarana prasarana dinyatakan baik.

4.3.2 Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan dalam konteks kajian ini merujuk pada organisasi pemuda, organisasi profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll), organisasi olah raga, LPM atau sebutan lain, kelompok

gotong royong, karang taruna, lembaga adat budaya dan kesenian, kelompok usaha, koperasi, organisasi perempuan. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai eksistensi lembaga kemasyarakatan pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 17: Lembaga Kemasyarakatan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Terisi	71,67	Baik
2	Pasekan	78,33	Baik
3	Bongas	80,00	Baik
4	Sukagumiwang	83,33	Baik
5	Widasari	85,00	Baik
6	Indramayu	86,67	Baik
7	Sindang	88,33	Baik
8	Losarang	88,33	Baik
9	Gabus Wetan	88,33	Baik
10	Kroya	88,33	Baik
11	Patrol	88,33	Baik
12	Sukra	90,33	Baik
13	Arahan	90,00	Baik
14	Karangampel	90,00	Baik
15	Gantar	90,00	Baik
16	Bangodua	90,00	Baik
17	Cantigi	91,67	Baik
18	Kedokan Bunder	91,67	Baik
19	Balongan	93,33	Baik
20	Haurgeulis	93,33	baik
21	Anjatan	93,33	Baik
22	Slieg	93,33	Baik
23	Kertasmaya	93,33	Baik

24	Lelea	95,00	Baik
25	Lohbener	98,33	Baik
26	Krangkeng	98,33	Baik
27	Juntinyuat	98,33	Baik
28	Cikedung	98,33	Baik
29	Tukdana	100,00	Sempurna
30	Kandanghaur	100,00	Sempurna
31	Jatibarang	100,00	Sempurna
Rata-rata		90,77	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Terisi dengan skor 71,67 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Kandanghaur dan Jatibarang dengan skor 100 dengan kriteria sempurna. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 90,77 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek kelembagaan masyarakat pada desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini organisasi pemuda, organisasi profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll), organisasi olah raga, LPM atau sebutan lain, kelompok gotong royong, karang taruna, lembaga adat budaya dan kesenian, kelompok usaha, koperasi, organisasi perempuan dinyatakan baik.

4.3.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kajian ini merujuk pada lembaga PKK, program PKK, organisasi PKK. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah desa di Kabupaten

Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 18: Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Cantigi	80,00	Baik
2	Arahan	83,30	Baik
3	Krangkeng	86,60	Baik
4	Kedokan Bunder	86,60	Baik
5	Juntinyuat	90,00	Baik
6	Kroya	90,00	Baik
7	Slieg	93,30	Baik
8	Widasari	93,30	Baik
9	Sukagumiwang	93,30	Baik
10	Patrol	93,30	baik
11	Sukra	93,30	Baik
12	Cikedung	93,30	Baik
13	Terisi	93,30	Baik
14	Gabus Wetan	93,30	Baik
15	Indramayu	96,60	Baik
16	Karangampel	96,60	Baik
17	Gantar	96,60	Baik
18	Balongan	100,00	Sempurna
19	Anjatan	100,00	sempurna
20	Sindang	100,00	sempurna
21	Pasekan	100,00	Sempurna
22	Haurgeulis	100,00	Sempurna
23	Lohbener	100,00	Sempurna
24	Jatibarang	100,00	Sempurna
25	Kertasmaya	100,00	Sempurna
26	Bangodua	100,00	Sempurna
27	Tukdana	100,00	Sempurna

28	Lelea	100,00	Sempurna
29	Losarang	100,00	Sempurna
30	Kandanghaur	100,00	Sempurna
31	Bongas	100,00	Sempurna
Rata-Rata		94,98	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Cantigi dengan skor 80,00 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Balongan, Sindang, Pasekan, Lohbener, Jatibarang, Kertasmaya, Bangodua, Tukdana, Lelea, Losarang, Kandanghaur dan Bongas dengan skor 100 dengan kriteria sempurna. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 94,98 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini lembaga PKK, program PKK, organisasi PKK dinyatakan baik.

4.3.4 Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban dalam konteks kajian ini merujuk pada pengamanan lingkungan dan manusia, konflik sara, perkelahian, pencurian dan perampokan, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga, penculikan dan HIV/Aids. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai keamanan dan ketertiban pada pemerintah desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 19: Keamanan dan Ketertiban

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Bongas	59,26	Sedang

2	Cikedung	61,11	Sedang
3	Widasari	62,22	Sedang
4	Terisi	62,96	Sedang
5	Lohbener	65,18	Baik
6	Krangkeng	65,92	Baik
7	Arahan	67,03	Baik
8	Kedokan Bunder	72,96	Baik
9	Gabus Wetan	72,96	Baik
10	Lelea	76,29	Baik
11	Tukdana	77,03	Baik
12	Patrol	78,05	Baik
13	Slieg	78,51	Baik
14	Sukra	79,08	baik
15	Sukagumiwang	79,62	baik
16	Cantigi	80,00	Baik
17	Juntinyuat	80,73	Baik
18	Anjatan	80,90	Baik
19	Kertasmaya	81,48	Baik
20	Gantar	82,77	Baik
21	Losarang	83,33	Baik
22	Karangampel	84,81	Baik
23	Haurgeulis	84,81	Baik
24	Kandanghaur	84,81	Baik
25	Kroya	84,81	Baik
26	Bangodua	85,18	Baik
27	Indramayu	86,29	Baik
28	Pasekan	86,67	Baik
29	Jatibarang	86,67	Baik
30	Sindang	87,03	Baik
31	Balongan	87,40	Baik
Rata-Rata		76,93	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Bongas dengan skor 59,62 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Balongan dengan skor 87,40 dengan kriteria baik. Adapun rata-rata skor yang di dapat adalah 76,93 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek keamanan dan ketertiban pada desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini pengamanan lingkungan dan manusia, konflik sara, perkelahian, pencurian dan perampokan, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga, penculikan dan HIV/Aids dinyatakan baik.

4.3.5 Pendidikan

Pendidikan dalam konteks kajian ini merujuk pada buta huruf, putus sekolah dan tamat sekolah. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai pendidikan pada desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 20: Pendidikan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Terisi	32,14	Buruk
2	Kedokan Bunder	34,5	Sedang
3	Gabus Wetan	34,5	Sedang
4	Lelea	38,07	Sedang
5	Losarang	42,86	Sedang
6	Kandanghaur	45,21	Sedang
7	Gantar	46,27	Sedang
8	Karangampel	47,61	Sedang
9	Sukra	47,91	Sedang

10	Krangkeng	48,79	Sedang
11	Sukagumiwang	48,79	Sedang
12	Cikedung	48,79	Sedang
13	Patrol	49,80	Sedang
14	Arahan	51,18	Sedang
15	Bongas	52,36	Sedang
16	Pasekan	54,75	Sedang
17	Slieg	54,75	Sedang
18	Kroya	55,93	Sedang
19	Balongan	60,71	Sedang
20	Bangodua	60,71	Sedang
21	Tukdana	60,71	Sedang
22	Anjatan	60,71	Sedang
23	Haurgeulis	60,71	Sedang
24	Indramayu	60,71	Sedang
25	Juntinyuat	61,89	Sedang
26	Sindang	63,07	Sedang
27	Lohbener	65,46	Baik
28	Jatibarang	67,86	Baik
29	Cantigi	69,04	Baik
30	Kertasmaya	71,43	Baik
31	Widasari	77,36	Baik
Rata-Rata		54,20	Sedang

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Terisi dengan skor 32,14 dengan kriteria buruk dan tertinggi di Kecamatan Widasari dengan skor 77,36 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 54,20 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek pendidikan pada masyarakat desa di

Kabupaten Indramayu dalam hal ini buta huruf, putus sekolah dan tamat sekolah rendah.

4.3.6 Kesehatan

Kesehatan dalam konteks kajian ini merujuk pada kematian bayi, gizi dan kematian balita, Posyandu, kepemilikan jamban dalam rumah tangga dan fasilitas kesehatan lingkungan. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai kesehatan pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 21: Kesehatan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Sukagumiwang	64,71	Baik
2	Terisi	68,62	Baik
3	Losarang	68,62	Baik
4	Lohbener	71,56	Baik
5	Bongas	71,56	Baik
6	Gantar	71,56	Baik
7	Krangkeng	72,53	Baik
8	Kandanghaur	74,50	Baik
9	Gabus Wetan	79,41	Baik
10	Slieg	81,35	Baik
11	Sukra	81,35	Baik
12	Cikedung	82,35	Baik
13	Karangampel	83,32	Baik
14	Patrol	83,88	Baik
15	Juntinyuat	84,29	Baik
16	Kertasmaya	84,29	Baik
17	Bangodua	86,26	Baik
18	Haurgeulis	87,01	Baik

19	Anjatan	87,12	Baik
20	Lelea	87,24	Baik
21	Sindang	89,21	Baik
22	Tukdana	89,21	Baik
23	Widasari	90,18	Baik
24	Pasekan	91,18	Baik
25	Arahan	91,18	Baik
26	Kroya	91,18	Baik
27	Indramayu	91,18	Baik
28	Kedokan Bunder	94,12	Baik
29	Balongan	98,03	Baik
30	Cantigi	98,03	Baik
31	Jatibarang	99,03	Baik
Rata-Rata		83,97	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Sukagumiwang dengan skor 64,71 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Jatibarang dengan skor 99,03 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 83,97 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek kesehatan pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini kematian bayi, gizi dan kematian balita, Posyandu, kepemilikan jamban dalam rumah tangga dan fasilitas kesehatan lingkungan dinyatakan baik.

4.3.7 Ekonomi

Ekonomi dalam konteks kajian ini merujuk pada pengangguran dan kelembagaan ekonomi. Berdasarkan penggalan data di lapangan mengenai ekonomi pada

masyarakat desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 22: Ekonomi

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Terisi	41,67	Sedang
2	Cikedung	52,78	Sedang
3	Lohbener	55,56	Sedang
4	Kedokan Bunder	55,56	Sedang
5	Karangampel	58,33	Sedang
6	Gabus Wetan	58,33	Sedang
7	Balongan	61,11	Sedang
8	Juntinyuat	61,11	Sedang
9	Gantar	61,11	Sedang
10	Patrol	61,11	Sedang
11	Kertasmaya	61,11	Sedang
12	Tukdana	61,11	Sedang
13	Sukra	61,11	sedang
14	Indramayu	63,89	Sedang
15	Slieg	63,89	Sedang
16	Bangodua	63,89	Sedang
17	Lelea	63,89	Sedang
18	Bongas	63,89	Sedang
19	Pasekan	66,67	Baik
20	Anjatan	66,67	Baik
21	Cantigi	66,67	Baik
22	Haurgeulis	66,67	Baik
23	Arahan	66,67	Baik
24	Widasari	66,67	Baik
25	Kandanghaur	66,67	Baik
26	Krangkeng	69,44	Baik
27	Jatibarang	72,22	Baik

28	Sukagumiwang	72,22	Baik
29	Kroya	75,00	Baik
30	Losarang	77,78	Baik
31	Sindang	83,33	Baik
Rata-Rata		64,21	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Terisi dengan skor 41,67 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Sindang dengan skor 83,33 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 64,21 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek ekonomi pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini pengangguran dan kelembagaan ekonomi dinyatakan baik.

4.3.8 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dalam konteks kajian ini merujuk pada data masyarakat miskin dan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai penanggulanagn kemiskinan pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 23: Penanggulangan Kemiskinan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Pasekan	75,00	Baik
2	Cantigi	75,00	Baik
3	Arahan	75,00	Baik
4	Indramayu	83,33	Baik
5	Gantar	83,33	Baik
6	Sindang	83,33	Baik

7	Widasari	83,33	Baik
8	Balongan	91,67	Baik
9	Lelea	91,67	Baik
10	Terisi	91,67	Baik
11	Bongas	91,67	Baik
12	Patrol	91,67	Baik
13	Gabus Wetan	91,67	Baik
14	Lohbener	100	Sempurna
15	Sukra	100	Sempurna
16	Karangampel	100	Sempurna
17	Krangkeng	100	Sempurna
18	Kedokan Bunder	100	Sempurna
19	Anjatan	100	Sempurna
20	Juntinyuat	100	Sempurna
21	haurgeulis	100	Sempurna
22	Slieg	100	Sempurna
23	Jatibarang	100	Sempurna
24	Kertasmaya	100	Sempurna
25	Sukagumiwang	100	Sempurna
26	Bangodua	100	Sempurna
27	Tukdana	100	Sempurna
28	Cikedung	100	Sempurna
29	Losarang	100	Sempurna
30	Kandanghaur	100	Sempurna
31	Kroya	100	Sempurna
Rata-Rata		93,59	baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Pasekan dengan skor 75,00 dengan kriteria baik dan tertinggi di Kecamatan Lohbener, Karangampel, Krangkeng, Juntinyuat, Kedokan

Bunder, Slieg, Jatibarang, Kertasmaya, Sukagumiwang, Bangodua, Tukdana, Cikedung, Losarang, Kandanghaur dan Kroya dengan skor 100 dengan kriteria sempurna. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 93,59 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini data masyarakat miskin dan program penanggulangan kemiskinan dinyatakan baik.

4.3.9 Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam konteks kajian ini merujuk pada analisa kebutuhan dan pelaksanaan program. Berdasarkan penggalian data di lapangan mengenai peningkatan kapasitas masyarakat pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu didapati hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 24: Peningkatan Kapsitas Masyarakat

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Balongan	44,44	Sedang
2	Indramayu	55,56	Sedang
3	Sindang	55,56	Sedang
4	Pasekan	61,11	Sedang
5	Cantigi	61,11	Sedang
6	Arahan	61,11	Sedang
7	Sukagumiwang	61,11	Sedang
8	Gantar	61,11	Sedang
9	Terisi	61,11	Sedang
10	Losarang	61,11	Sedang
11	Slieg	66,67	Baik
12	Jatibarang	66,67	Baik

13	Patrol	66,67	Baik
14	Sukra	66,67	Baik
15	Widasari	66,67	Baik
16	Bangodua	66,67	Baik
17	Anjatan	66,67	Baik
18	Tukdana	66,67	Baik
19	Haurgeulis	66,67	Baik
20	Lelea	66,67	Baik
21	Cikedung	66,67	Baik
22	Kandanghaur	66,67	Baik
23	Bongas	66,67	Baik
24	Kroya	66,67	Baik
25	Karangampel	72,22	Baik
26	Lohbener	77,78	Baik
27	Kertasmaya	77,78	Baik
28	Gabus Wetan	77,83	Baik
29	Kedokan Bunder	88,89	Baik
30	Krangkeng	100	Sempurna
31	Juntinyuat	100	Sempurna
Rata-Rata		Kesehatan	baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Balongan dengan skor 44,44 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Krangkeng dan Juntinyuat dengan skor 100 dengan kriteria sempurna. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 68,59 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat pada masyarakat desa di Kabupaten Indramayu dalam hal ini analisa kebutuhan dan pelaksanaan program dinyatakan baik.

Data skor gabungan dari sembilan aspek bidang kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25: Bidang Kemasyarakatan

No	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Terisi	59,09	Sedang
2	Bongas	66,36	Baik
3	Widasari	69,39	Baik
4	Gabus Wetan	70,76	Baik
5	Arahan	70,91	Baik
6	Cikedung	70,91	Baik
7	Kedokan Bunder	72,12	Baik
8	Lohbener	73,03	Baik
9	Gantar	73,03	Baik
10	Patrol	73,18	baik
11	Krangkeng	73,18	Baik
12	Losarang	74,70	Baik
13	Sukra	75,87	Baik
14	Lelea	76,36	Baik
15	Sukagumiwang	76,82	Baik
16	Cantigi	76,97	Baik
17	Tukdana	77,58	Baik
18	Kandanghaur	78,03	Baik
19	Anjatan	78,51	Baik
20	Slieg	79,24	Baik
21	Haurgeulis	79,55	Baik
22	Pasekan	80,00	Baik
23	Indramayu	81,06	Baik

24	Karangampel	81,21	Baik
25	Kroya	82,12	Baik
26	Bangodua	82,27	Baik
27	Sindang	82,73	Baik
28	Kertasmaya	82,73	Baik
29	Juntinyuat	83,03	Baik
30	Balongan	83,64	Baik
31	Jatibarang	85,15	Baik
Rata-Rata		76,52	Baik

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah terdapat di Kecamatan Terisi dengan skor 59,09 dengan kriteria sedang dan tertinggi di Kecamatan Jatibarang dengan skor 85,15 dengan kriteria baik. Adapaun rata-rata skor yang di dapat adalah 76,52 dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa aspek kemasyarakatan yang meliputi partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat dapat dinyatakan baik.

Dari tiap indikatornya dalam aspek bidang kemasyarakatan didapat data sebagai berikut:

Tabel 26: Indikator Bidang Kemasyarakatan

Pendidikan	54,20
Ekonomi	64,21
Peningkatan Kapasitas Masyarakat	68,59
Kemanan dan Ketertiban	76,93
Partisipasi Masyarakat	80,37
Kesehatan	83,97
Lembaga Kemasyarakatan	90,77

Penanggulangan Kemiskinan	93,59
Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	94,98
Rata-Rata	78,62

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil skor terendah adalah pendidikan masyarakat desa di Kabupaten Indramayu yang meliputi keaksaraan fungsional, ketuntasan belajar dengan skor 54,20 dengan kategori sedang. Skor tertinggi terdapat pada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu dengan skor 94,98 dengan kategori baik. Adapun rata-rata skornya adalah 78,72 dengan kategori baik. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan bahwa aspek kemasyarakatan pada desa di Kabupaten Indramayu dinyatakan sedang.

4.4 Analisis Data Kajian

Analisis data bersumberkan dari data-data tiap bidang yang sudah di rekapitulasi. Adapun hasil rekapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 27: Rekapitulasi semua Bidang

Bidang	Unit Kajian	Skor
Pemerintahan	Desa Berbasis Teknologi Informasi/e-Government	75,27
	Kinerja	76,69
	Pemerintah Desa	80,17
	Inisiatif Dan Kreativitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat	85,54
	Pelestarian Adat dan Budaya	90,26
Kewilayahan	Tanggap dan Siaga Bencana	55,3
	Inovasi	59,47
	Pengaturan Investasi	60,64

Kemasyarakatan	Pendidikan	54,2
	Ekonomi	64,21
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	68,59
	Kemanan dan Ketertiban	76,93
	Partisipasi Masyarakat	80,37
	Kesehatan	83,97
	4.5 Lembaga Kemasyarakatan	90,77
	Penanggulangan Kemiskinan	93,59
	Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	94,98
	Total Pencapaian	75,94

Berdasarkan data di atas secara generalisasi menunjukkan adanya perkembangan yang baik di desa. Baik itu meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Pada aspek pemerintahan di desa menunjukkan kondisi yang baik. Dengan demikian tentunya akan berkontribusi dalam percepatan perkembangan desa. Kondisi yang baik tentunya berkat dukungan dari beberapa pihak baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat.

Pada aspek kewilayahan menunjukkan situasi yang berbeda dengan aspek pemerintahan. Kesadaran pemerintah desa terhadap bencana, inovasi dan investasi masih belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah desa. Padahal ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada aspek kemasyarakatan titik yang menjadi perhatian adalah aspek ekonomi dan pendidikan. Pada aspek ekonomi belum menjadi sebuah prioritas pemerintah desa. Terlihat kondisi di lapangan bahwa dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pada aspek pendidikan terdapat

beberapa hal penting yang menjadikan skor pendidikan kecil. Beberapa faktor diantaranya adalah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Setidaknya fenomena buruh migran menjadikan pendidikan kurang menjadi perhatian masyarakat.

4.5 Analisis Klaster

4.5.1 Analisis Klaster Bidang Pemerintahan

Analisis pengklasteran pada bidang pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 28: Klaster Bidang Pemerintahan

Kecamatan	Bidang				
	1	2	3	4	5
Anjatan	1	1	1	1	1
Arahan	1	1	1	1	1
Bangodua	1	1	1	1	1
Cantigi	1	1	2	1	1
Haurgeulis	1	1	1	1	1
Juntinyuat	1	1	1	1	1
Kandanghaur	1	1	1	1	1
Kertasmaya	1	1	1	1	1
Kroya	1	1	1	1	1
Tukdana	1	1	1	1	1
Bongas	1	1	1	1	1
Cikedung	1	1	1	1	1
Gabus Wetan	1	1	1	1	1
Jatibarang	1	1	1	1	1
Karangampel	1	2	1	1	1
Kedokan Bunder	1	1	1	1	1
Krangkeng	1	1	1	1	1
Lelea	2	1	1	1	1
Lohbener	1	1	1	1	1
Patrol	1	1	1	1	1

Slieg					
Sukagumiwang					
Terisi					
Widasari					
Balongan					
Gantar					
Indramayu					
Losarang					
Pasekan					
Sindang					
Sukra					

Keterangan

- Angka 1 : Pemerintahan Desa
 Angka 2 : Kinerja
 Angka 3 : Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat
 Angka 4 : Desa Berbasis Teknologi Informasi / E-Government
 Angka 5 : Pelestarian Adat Dan Budaya

-  : Kondisi eksisting baik
 : Kondisi eksisting sedang

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum kondisi pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu adalah baik. Hal ini ditandai dengan sebaran warna hijau yang mendominasi. Bidang-bidang yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Bidang kinerja terdapat delapan sebaran sebaran kuning yang meliputi kecamatan Karangampel, Sukagumiwang, Balongan, Gantar, Indramayu, Losarang, Pasekan dan Sindang.
2. Bidang Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat terdapat empat sebaran warna kuning yang meliputi: Cantigi, Balongan, Indramayu, Sindang.
3. Bidang Pemerintahan Desa terdapat dua sebaran warna kuning yang meliputi: Lelea dan Pasekan.

4. Bidang Desa Berbasis Teknologi Informasi / E-Government terdapat dua sebaran warna kuning yang meliputi: Losarang dan Sindang.

4.5.2 Analisis Klaster Bidang Kewilayahan

Analisis pengklasteran pada bidang kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 29: Klaster Bidang Kewilayahan

Kecamatan	Bidang		
	1	2	3
Slieg	Yellow	Green	Green
Widasari	Green	Yellow	Green
Anjatan	Yellow	Red	Yellow
Arahan	Green	Red	Yellow
Cantigi	Green	Red	Yellow
Gabus Wetan	Yellow	Red	Yellow
Haurgeulis	Red	Yellow	Red
Juntinyuat	Yellow	Red	Yellow
Kedokan Bunder	Green	Red	Red
Kertasmaya	Yellow	Red	Red
Krangkeng	Red	Red	Red
Lelea	Yellow	Yellow	Yellow
Lohbener	Green	Yellow	Red
Sukagumiwang	Yellow	Yellow	Red
Tukdana	Green	Yellow	Yellow
Balongan	Red	Red	Yellow
Bangodua	Red	Red	Red
Bongas	Red	Red	Yellow
Cikedung	Red	Red	Yellow
Gantar	Red	Red	Yellow
Indramayu	Red	Red	Yellow
Jatibarang	Red	Red	Yellow
Kandanghaur	Red	Red	Yellow
Karangampel	Red	Red	Red
Kroya	Red	Red	Yellow

Losarang	Red	Red	Yellow
Partol	Red	Red	Red
Pasekan	Red	Red	Yellow
Sindang	Red	Red	Yellow
Sukra	Yellow	Red	Red
Terisi	Red	Red	Red

Keterangan

- Angka 1 : Inovasi
 Angka 2 : Tanggap Siaga Bencana
 Angka 3 : Pengaturan Investasi

	: Kondisi eksisting baik
	: Kondisi eksisting sedang
	: Kondisi eksisting buruk

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum kondisi kewilyahan di Kabupaten Indramayu adalah buruk. Hal ini ditandai dengan sebaran warna merah yang mendominasi. Berdasarkan analisis kluster Bidang-bidang yang memiliki catatan buruk adalah sebagai berikut:

1. Bidang tanggap siaga bencana terdapat 24 sebaran sebaran merah yang meliputi: Kecamatan Anjatan, Arahau, Cantigi, Gabus Wetan, Haurgeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.
2. Bidang Inovasi terdapat 17 sebaran warna merah yang meliputi: Kecamatan Haurgeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.

3. Bidang pengaturan investasi terdapat 11 sebaran warna merah yang meliputi: Kecamatan Haurgeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.

Selain bidang yang memiliki catatan buruk pada aspek kewilayahan terdapat bidang dengan catatan sedang yakni:

1. Bidang pengaturan investasi terdapat 18 sebaran warna kuning yang meliputi: Kecamatan Anjatan, Arah, Cantigi, Gabus Wetan, Haurgeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan dan Sindang.
2. Bidang inovasi terdapat 8 sebaran warna kuning yang meliputi: Kecamatan Slieg, Anjatan, Gabus Wetan, Juntinyuat, Kertasmaya, Lelea, Sukagumiwang dan Sukra.
3. Bidang tanggap siaga bencana terdapat 6 sebaran sebaran kuning yang meliputi: Kecamatan Widasari, Haurgeulis, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang dan Tukdana.

4.5.3 Analisis Kluster Bidang Kemasyarakatan

Analisis pengklasteran pada bidang kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30: Kluster Bidang Kemasyarakatan

Kecamatan	Bidang								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cikedung	Green	Green	Green	Yellow	Red	Green	Red	Green	Yellow
Gabus Wetan	Yellow	Green	Green	Green	Red	Green	Red	Green	Green
Juntinyuat	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green

Karangampel								
Kedokan Bunder								
Kertasmaya								
Krangkeng								
Lohbener								
Slieg								
Bongas								
Sukagumiwang								
Terisi								
Anjatan								
Arahan								
Balongan								
Bangodua								
Cantigi								
Gantar								
Haurgeulis								
Indramayu								
Jatibarang								
Kandanghaur								
Kroya								
Lelea								
Losarang								
Pasekan								
Patrol								
Sindang								
Sukra								
Tukdana								
Widasari								

Keterangan

- Angka 1 : Partisipasi Masyarakat
- Angka 2 : Lembaga Kemasyarakatan
- Angka 3 : Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
- Angka 4 : Keamanan dan Ketertiban
- Angka 5 : Pendidikan
- Angka 6 : Kesehatan
- Angka 7 : Ekonomi

Angka 8 : Penanggulangan Kemiskinan
Angka 9 : Peningkatan Kapasitas Masyarakat



: Kondisi eksisting baik
: Kondisi eksisting sedang
: Kondisi eksisting buruk

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum kondisi kemasyarakatan di Kabupaten Indramayu adalah baik. Hal ini ditandai dengan sebaran warna hijau yang mendominasi. Berdasarkan analisis kluster Bidang-bidang yang memiliki catatan buruk adalah sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan terdapat 19 sebaran sebaran merah yang meliputi: Kecamatan Cikedung, Gabus Wetan, Karangampel, Kedokan Bunder, Krangkeng, Bongas, Slieg, Sukagumiwang, Terisi, Araham, Indramayu, Gantar, Kandanghaur, Kroya, Lelea, Losarang, Pasekan, Patrol dan Sukra.
2. Bidang ekonomi terdapat 6 sebaran warna merah yang meliputi: Kecamatan Cikedung, Gabus Wetan, Karangampel, Kedokan Bunder, Lohbener dan Terisi.
3. Bidang peningkatan kapasitas masyarakat terdapat 3 sebaran warna merah yang meliputi: Kecamatan Balongan, Sindang dan Sukra.
4. Bidang keamanan ketertiban terdapat 1 sebaran warna merah yakni Kecamatan Bongas.
5. Bidang penanggulangan kemiskinan terdapat 1 sebaran warna merah yang yakni Kecamatan Indramayu.

Selain bidang yang memiliki catatan buruk pada aspek kemasyarakatan terdapat bidang dengan catatan sedang yakni:

1. Bidang peningkatan kapasitas masyarakat terdapat 20 sebaran warna kuning yang meliputi Kecamatan Cikedung, Slieg, Bongas, Terisi, Sukagumiwang, Bangodua, Araham, Cantigi, Gantar, Haurgeulis,

- Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Kroya, Lelea, Losarang, Pasekan, Patrol, Tukdana dan Widasari.
2. Bidang ekonomi terdapat 20 sebaran warna kuning yang meliputi Kecamatan Juntinyuat, Krangkeng, Kertasmaya, Slieg, Bongas, Anjatan, Arahan, Balongan, Bangodua, Cantigi, Gantar, Indramayu, Haurgeulis, Kandanghaur, Lelea, Patrol, Pasekan, Sukra, Tukdana dan Widasari.
 3. Bidang pendidikan terdapat 10 sebaran warna kuning yang meliputi Kecamatan Juntinyuat, Lohbener, Anjatan, Balongan, Bangodua, Cantigi, Haurgeulis, Jatibarang, Sindang dan Tukdana.
 4. Bidang kemanan ketertiban terdapat 6 sebaran warna kuning yang meliputi Kecamatan Cikedung, Krangkeng, Lohbener, Terisi, Arahan dan Widasari.
 5. Bidang partisipasi masyarakat terdapat 4 sebaran warna kuning yang meliputi: Kecamatan Gabus Wetan, Bongas, Tukdana dan Widasari.
 6. Bidang kesehatan terdapat 3 sebaran warna kuning yang meliputi: Kecamatan Sukagumiwang, Terisi dan Losarang.

BAB V. SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang tersaji dan analisis pembahasan maka kesimpulan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi secara general pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan pada desa di Kabupaten Indramayu dinyatakan baik dengan rata-rata total 79,54.
2. berdasarkan skor yang di dapat tertinggi adalah bidang pemerintahan yakni 81,58. Berikutnya adalah aspek kemasyarakatan yakni 78,62 dan terakhir adalah kewilayahan yakni 58,47.
3. terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai di bawah rata-rata total yakni:
 - a. Desa Berbasis Teknologi Informasi/e-Government dengan nilai skor 75,27.
 - b. Tanggap dan Siaga Bencana dengan nilai skor 55,3
 - c. Inovasi dengan nilai skor 59,47
 - d. Pengaturan Investasi dengan nilai skor 60,64
 - e. Pendidikan dengan nilai skor 54,2
 - f. Ekonomi dengan nilai skor 64,21
 - g. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dengan nilai skor 68,59

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Prioritas	Kegiatan		Keluaran	Sasaran Prioritas
Kinerja	1	Pembuatan standar pelayanan publik yang memperhatikan aspek standar waktu, standar biaya, standar produk pelayanan	Tercapainya pelayanan publik yang prima	Pemerintahan desa di kecamatan: Karangampel, Sukagumiwang, Balongan, Gantar, Indramayu, Losarang, Pasekan dan Sindang
	2	Pembuatan standar kinerja dan penilaian kinerja perangkat desa	adanya standarisasi penilaian kinerja aparatur desa	
	3	Meningkatkan pembinaan bagi perangkat desa	Adanya etos kerja yang baik	
Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	1	Memasukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan melalui RPJM Des atau RKP Des	adanya payung hukum kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pemerintahan desa di kecamatan: Cantigi, Balongan, Indramayu, Sindang.
	2	Menambahkan anggaran desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat	Adanya kepastian anggaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	
	3	Menguatkan kegiatan pemerintah desa berbasis bottom up	Terciptanya keberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan	
Bidang Pemerintahan Desa	1	Pembinaan terhadap masyarakat terkait peran dalam pembangunan	Munculnya kesadaran peran masyarakat dalam pembangunan	Pemerintahan desa di kecamatan: Lelea dan Pasekan.
	2	Peningkatan sarana prasarana kantor BPD. Optimalisasi Peran BPD. Peningkatan Kapasitas SDM BPD	Optimalisasi kinerja BPD	
	3	Peningkatan sarana prasarana kerja perangkat desa. Peningkatan kesejahteraan perangkat desa,	Optimalisasi kinerja perangkat desa	
	4	Peningkatan penatalaksanaan administrasi desa	Ketertiban dalam pelaksanaan administrasi	

	5	Pembuatan laporan berkala kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa	Keterbukaan informasi publik	
Desa Berbasis Teknologi Informasi/e-Government	1	Peningkatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa berbasis teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat	Pemerintah desa di Kecamatan: Losarang dan Sindang
	2	Peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi komunikasi bagi perangkat desa beserta jajarannya	Adanya kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi komunikasi	

5.2.2 Bidang Kewilayahan

Sub Bidang Prioritas	Kegiatan		Keluaran	Sasaran Prioritas
Tanggap dan Siaga Bencana	1	Pembuatan peta resiko bencana tingkat desa	Adanya peta tematik bencana yang bertujuan untuk pencegahan bencana	Pemerintahan desa di kecamatan: Anjatan, Arahan, Cantigi, Gabus Wetan, Haurgeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.
	2	Pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana di tiap desa	Adanya tim yang dapat diturunkan dengan cepat ke lokasi bencana tanpa harus menunggu bantuan dari luar yang akan memakan waktu	
	3	Penyediaan sarana evakuasi untuk korban bencana	Adanya tempat perlindungan bagi korban bencana	
	4	Sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat bencana bagi masyarakat	Muncul kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana dan adanya kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	

Inovasi	1	Pemetaan potensi SDA, SDM dan Budaya yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat	Adanya data informasi potensi-potensi SDA dan SDM yang dapat dikembangkan	Pemerintahan desa di kecamatan: Hargeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.
	2	Mengembangkan karakteristik produk unggulan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Adanya produk unggulan desa	
	3	Mendesiminasiikan inovasi-inovasi teknologi, sosial, budaya kepada masyarakat	Adanya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan aspek sosial, ekonomi, budaya	
Investasi	1	Program balik kampung dalam hal ini mengajak pelaku usaha sukses dari desa setempat untuk berinvestasi di desa	Masuknya dana investasi di desa	Pemerintahan desa di kecamatan: Hargeulis, Juntinyuat, Kedokan Bunder, Kertasmaya, Krangkeng, Lelea, Lohbener, Sukagumiwang, Tukdana, Balongan, Bangodua, Bongas, Cikedung, Gantar, Indramayu, Jatibarang, Kandanghaur, Karangampel, Kroya, Losarang, Partol, Pasekan, Sindang, Sukra dan Terisi.
	2	Penciptaan suasana nyaman investasi baik secara regulasi desa, keamanan	Adanya kepastian secara hukum dan keamanan dalam berinvestasi	
	3	Membangun kemitraan dengan berbagai pihak pelaku usaha	Terbangunnya koneksi dengan berbagai pihak	

5.2.3 Bidang Kemasyarakatan

Sub Bidang Prioritas	Kegiatan	Keluaran	Sasaran Prioritas
Pendidikan	1 Peningkatan angka partisipasi sekolah dan rentang usia pendidikan masyarakat melalui kebijakan atau program pemerintah desa yang bersinergi dengan dinas terkait	Peningkatan rentang usia pendidikan masyarakat	Pemerintah desa di kecamatan Cikedung, Gabus Wetan, Karangampel, Kedokan Bunder, Krangkeng, Bongas, Slieg, Sukagumiwang, Terisi, Arahan, Indramayu, Gantar, Kandanghaur, Kroya, Lelea, Losarang, Pasekan, Patrol dan Sukra.
	2 Penebalan anggaran kesejahteraan sosial untuk bantuan pendidikan bagi warga berprestasi dari kalangan tidak mampu	Peningkatan kualitas SDM	
Ekonomi	1 Pembinaan pelaku usaha kecil menengah	Kelangsungan dan pengembangan usaha pelaku usaha kecil menengah	Pemerintah desa di kecamatan Cikedung, Gabus Wetan, Karangampel, Kedokan Bunder, Lohbener dan Terisi.
	2 Bimbingan teknis bagi pelaku usaha kecil menengah	Kelangsungan dan pengembangan usaha pelaku usaha kecil menengah	
	3 Memfasilitasi sarana permodalan bagi pelaku usaha kecil menengah	Kelangsungan dan pengembangan usaha pelaku usaha kecil menengah	
	4 Memfasilitasi digital marketing bagi pelaku usaha kecil menengah	Kelangsungan dan pengembangan usaha pelaku usaha kecil menengah	
Peningkatan Kapasitas Masyarakat	1 Pengembangan keahlian usaha masyarakat	adanya disversifikasi kemampuan usaha masyarakat	Pemerintah desa di Kecamatan Kecamatan Balongan, Sindang dan Sukra
	2 Pembinaan terkait peran masyarakat dalam pembangunan	Tersedianya relawan-relawan yang mendukung kegiatan pembangunan	

Keamanan dan Ketertiban	1	Pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Terciptanya kondisi lingkungan yang aman	Pemerintah desa di Kecamatan Bongas
	2	Pembinaan masyarakat secara berkala dalam menjaga keamanan lingkungan	Terciptanya kondisi lingkungan yang aman	
Penanggulangan Kemiskinan	1	Pemutakhiran data kemiskinan secara berkala	Adanya data yang valid tentang kemiskinan	Pemerintah desa di Kecamatan Indramayu
	2	Penebalan anggaran kesejahteraan sosial untuk penanggulangan kemiskinan	Terdapat anggaran yang terjamin dalam penanggulangan kemiskinan	